

SKRIPSI

**PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN
MENGUNAKAN PRINSIP VALUE FOR MONEY PADA
DINAS ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
KOTA BATU**



Oleh

RISA WILIAN WILDANI
NIM : 15520027

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

SKRIPSI

PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MENGUNAKAN PRINSIP VALUE FOR MONEY PADA DINAS ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KOTA BATU

Diajukan Kepada :
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

RISA WILIAN WILDANI
NIM : 15520027

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN
MENGUNAKAN PRINSIP VALUE FOR MONEY PADA DINAS
ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KOTA BATU**

SKRIPSI

Oleh :

RISA WILIAN WILDANI

NIM : 15520027

Telah disetujui pada tanggal 25 November 2019

Dosen Pembimbing,



Nawirah, SE., MSA., Ak.
NIDT. 19860105 20180201 2 185

Mengetahui :



Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIDT. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN
MENGUNAKAN PRINSIP VALUE FOR MONEY PADA DINAS
ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KOTA BATU**

SKRIPSI

Oleh

RISA WILIAN WILDANI

NIM : 15520027

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 18 Desember 2019

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua

Hj. Yuliati, S, Sos., MSA.

NIDT : 19730703 20180201 2 184



2. Dosen Pembimbing

Nawirah, SE, MSA., Ak.

NIDT : 19860105 20180201 2 185



3. Penguji Utama

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA.

NIP : 19730719 200501 1 003



Disahkan Oleh :

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hikmah Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP : 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Bertandatangan di bawah ini :

Nama : Risa Wilian Wildani
NIM : 15520027
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money Pada Dinas Administrasi Ekonomi Dan Pembangunan Kota Batu” merupakan karya saya sendiri dan bukan hasil dari duplikasi karya orang lain. Apabila dilain hari ada klaim dari orang lain, maka bukan termasuk tanggungjawab Dosen Pembimbing dan pihak Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 25 November 2019
Hormat saya,



Risa Wilian Wildani
Nim : 15520027

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kupersembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya dapat menjadi orang yang bermanfaat, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal saya untuk meraih cita-cita saya dimasa depan.

Dengan ini kupersembahkan skripsi ini untuk orang yang aku sayangi :

Kedua orang tua ku Ibuku (Sri Warni), bapak (Supa'at) Tercinta yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, kakak (Defri Agtha Atdianto) dan adik (Rara Tri April Lia) yang turut serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. Terima kasih saya ucapkan.

Terima kasih buat mbahku Sumiati, saudaraku Mimi, Mbak Irma dan saudara ku lainnya yang turut serta memberi dukungan , motivasi dalam hidup ini. Terima kasih saya ucapkan.

Terima kasih buat sahabat ku Anis Husnun, Avina, Annisa, My Sun, Kampret teman-teman Lambe Seksiii yang selalu memberikan waktu mendengar keluh kesah memberikan motivasi do'a yang tidak akan pernah aku lupakan.

Sahabat seperjuanganku (Avina, Mbak Bibah, Sahrul, Cici, Difa , Hasna, teman-teman Action' 15 dan Teman Ngopiku) yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Terima kasih buat kalian semua.

HALAMAN MOTTO

”jangan mengeluh tentang hari kemarin, Buatlah hari esok yang lebih baik dengan melakukannya sebagian besar di hari ini.”



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money Pada Dinas Administrasi Ekonomi Dan Pembangunan Kota Batu”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT karena segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu HJ. Meldona, SE., MM., Ak., CA selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan selama menjadi mahasiswa akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu Nawirah, SE., MSA., Ak. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa mengarahkan.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

8. Pak Tavid selaku Kepala Bagian, Om Andhang , Pak Zulfaton, Buk Rus, , Bu Nova , Mbak Mariana yang berkenan untuk saya wawancarai
9. Mbak – mbak yang jaga resepsionis di Bagian Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Kota Batu yang selalu tersenyum
10. Bapak, ibu, kakak, Adik dan seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung setiap keputusan peneliti dalam mencari ilmu.
11. Teman-teman yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini
12. Semua pihak yang turut membantu dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna membantu menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi dunia akuntansi serta bagi pembaca sekalian.

Jazakumullah ahsanal jaza'... Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan keberkahan dan kebaikan bagi kalian untuk menggapai ridho-Nya. Aamiin...

Malang, 25 November 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

| | |
|---------------------------|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| ABSTRAK | xvi |
| ABSTRACT | xvii |
| المخلص | xviii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------|----|
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3 Tujuan | 10 |

| | |
|--|----|
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 10 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| 2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu | 12 |
| 2.2 Tinjauan Teoritis | 18 |
| 2.2.1 Pengertian rasio | 18 |
| 2.2.2 Rasio Ekonomi..... | 20 |
| 2.2.3 Rasio Efisiensi..... | 21 |
| 2.2.4 Rasio Efektivitas | 22 |
| 2.3 Konsep Pengukuran Kinerja | 23 |
| 2.3.1 Pengertian Kinerja | 23 |
| 2.3.2 Konsep Indikator Kinerja..... | 25 |
| 2.3.3 Pengukuran Kinerja..... | 27 |
| 2.4 Anggaran | 31 |
| 2.4.1 Anggaran Pendapatan Daerah (APBD)..... | 36 |
| 2.5 Akuntansi Pemerintahan | 39 |
| 2.5.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan | 39 |
| 2.5.2 Fungsi Akuntansi Pemerintahan | 39 |
| 2.5.3 Standar Akuntansi Pemerintahan | 41 |
| 2.5.4 Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan..... | 41 |

| | |
|--|----|
| 2.6 Value For Money | 42 |
| 2.6.1 Pengertian Value For Money | 42 |
| 2.6.2 Value For Money Sebagai Metode Penilaian Kinerja.. | 42 |
| 2.6.3 Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Value For Money.. | 43 |
| 2.6.4 Langkah-langkah Pengukuran Value For Money. | 44 |
| 2.6.5 Tujuan Value For Money..... | 45 |
| 2.6.6 Kerangka Berfikir..... | 46 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Perancangan Penelitian | 48 |
| 3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian..... | 48 |
| 3.3 Subjek Penelitian..... | 49 |
| 3.4 Jenis Dan Sumber Data | 49 |
| 3.4.1 Jenis Data | 49 |
| 3.4.2 Sumber Data | 50 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data..... | 50 |
| 3.5.1 Survei Lapangan | 50 |
| 3.5.2 Penelitian Kepustakaan | 51 |
| 3.6 Metode Analisis | 51 |
| 3.6.1 Rasio Ekonomi | 52 |
| 3.6.2 Rasio Efisiensi | 53 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| 3.6.3 Rasio Efektivitas | 54 |
| 3.7 Tahap-tahap Analisis Data | 54 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 4.1 Deskripsi Hasil Penelitian | 56 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Batu | 56 |
| 4.1.1.1 Topografi Kota Batu | 58 |
| 4.1.1.2 Kemiringan Kota Batu | 58 |
| 4.1.1.3 Pemanfaatan Lahan di Kota Batu | 59 |
| 4.1.1.4 Sumber Daya Manusia | 60 |
| 4.2 Analisa Data | 63 |
| 4.2.1 Rasio Ekonomi | 63 |
| 4.2.2 Rasio Efisiensi | 68 |
| 4.2.3 Rasio Efektivitas | 72 |
| 4.2.4 Rekapitulasi Rasio Keuangan Kota Batu tahun 2014-2018 | 78 |
| 4.3 Pembahasan | 79 |
| 4.3.1 Rasio Ekonomi | 79 |
| 4.3.2 Rasio Efisiensi | 80 |
| 4.3.3 Rasio Efektivitas | 81 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan..... 83

5.2 Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 12 |
| 2.1.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu | 17 |
| 2.2.2 Kriteria Ekonomi | 21 |
| 2.2.3 Kriteria Efisiensi | 22 |
| 2.2.4 Kriteria Efektifitas | 23 |
| 2.2.6 Kerangka Pemikiran..... | 47 |
| 4.1 Tabel Pemanfaatan Lahan Kota Batu Tahun 2018 | 59 |
| 4.1.4 Tabel Penduduk Kota Batu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018 | 61 |
| 4.2 Tabel Jumlah Penduduk Kota Batu Berdasarkan Jenis Pekerjaan | 61 |
| 4.2.1 Tabel Rasio Ekonomi Tahun 2014-2018 | 64 |
| 4.2.2 Tabel Rasio Efisiensi Tahun 2014-2018 | 69 |
| 4.2.3 Tabel Rasio Efektivitas Tahun 2014-2018 | 73 |
| 4.2.4 Tabel Kriteria Ekonomi | 78 |
| 4.2.5 Tabel Kriteria Efisiensi | 78 |
| 4.2.6 Tabel Kriteria Efektifitas | 78 |
| 4.2.7 Tabel Rekapitulasi Rasio Keuangan Kota Batu Tahun 2014-2018 | 79 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| 2.6.6 Kerangka Pemikiran..... | 47 |
| 4.1.1 Gambaran Komposisi Pemanfaatan Lahan Di Kota Batu Tahun 1014-2018 | 60 |
| 4.1.3 Jumlah Penduduk Kota Batu Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2018. | 62 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara

Lampiran 2 Laporan Keuangan

Lampiran 3 Dokumen Pendukung

Lampiran 4 Daftar Konsultasi

Lampiran 5 Biodata Peneliti

Lampiran 6 Surat Plagiasi



ABSTRAK

Risa. 2019. SKRIPSI. Judul: “Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money* Pada Bagian administrasi Ekonomi dan Pembangunan Kota Batu”

Pembimbing : Nawirah,SE., MSA., Ak.

Kata Kunci : Pengukuran kinerja, pemerintah daerah, *value for money*

Anggaran daerah merupakan desain teknis untuk pelaksanaan strategi. Apabila pengeluaran pemerintah mempunyai kualitas yang rendah, maka kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah juga cenderung melemah. Hal ini berakibat kepada wujud daerah dan Pemerintah Daerah di masa yang akan datang sulit untuk dicapai dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran daerah. Salah satu aspek penting adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip *value for money*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan menganalisis data yang terkait berupa data sekunder dan wawancara yang diperoleh dari Bagian Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Kota Batu kemudian dilakukan perhitungan rasio-rasio yang digunakan dalam metode *value for money*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ekonomi Pemerintah Kota Batu tahun 2014 sampai dengan 2018 kurang dari 100%, maka artinya adalah ekonomis. Rasio efisiensi untuk tahun 2014 sampai dengan 2018 kurang dari 100% artinya sangat efisien, sedangkan untuk tahun 2015 Lebih dari 100% artinya tidak efisien. Rasio Efektifitas tahun 2014-2018 rasionya lebih dari 100% artinya adalah efektif, hal ini pemerintah mampu mengelola sumber daya keuangan daerah dengan baik dan mampu memenuhi target penerimaan daerah. Sedangkan tahun 2016 dan 2017 rasionya kurang dari 100% artinya tidak efisien, hal ini pemerintah tidak dapat memenuhi target penerimaan daerah.

ABSTRACT

| | |
|--------------------------|---|
| Risa 2019. Thesis. Title | : "Measurement of Local Government Performance Using the Value For Money Principle in the Administration of the Economy and Development of Batu City" |
| Advisor | : Nawirah,SE., MSA., Ak. |
| Keywords | : Performance measurement, local government, value for money |

The regional budget is a technical design for implementing the strategy. If government spending has a low quality, then the quality of the implementation of the functions of the Regional Government also tends to weaken. This results in the form of the region and the Regional Government in the future is difficult to achieve in order to improve the performance of the local budget. One important aspect is the problem of managing regional finances and local budgets. The research objective is to determine the measurement of local government performance using the value for money principle.

This research uses descriptive qualitative method by analyzing the related data in the form of secondary data and interviews obtained from the Department of Economic Administration and Development of Batu City and then calculating the ratios used in the value for money method.

The results showed that the economic ratio of Batu City Government in 2014 to 2018 was less than 100%, so the meaning was economical. The efficiency ratio for 2014 to 2018 is less than 100% which means it is very efficient, while for 2015 it is more than 100% meaning inefficient. Effectiveness Ratio in 2014-2018 the ratio is more than 100% meaning it is effective, this is the government is able to manage regional financial resources properly and is able to meet regional revenue targets. Whereas in 2016 and 2017 the ratio is less than 100% meaning it is inefficient, this is the government cannot meet the regional revenue target.

الملخص الملخص

ريسا. 2019. أطروحة. العنوان: "قياس أداء الحكومة المحلية باستخدام مبدأ القيمة مقابل المال في إدارة الاقتصاد والتنمية في مدينة باتو"

المشرف : نويرا ، جنوب شرق ، MSA ، أك .
الكلمات المفتاحية : قياس الأداء ، الحكومة المحلية ، القيمة مقابل المال

الميزانية الإقليمية هي تصميم تقني لتنفيذ الإستراتيجية. إذا كان الإنفاق الحكومي منخفض الجودة ، فإن جودة تنفيذ وظائف الحكومة الإقليمية تميل أيضا إلى الضعف. ينتج عن هذا شكل المنطقة والحكومة الإقليمية في المستقبل يصعب تحقيقها من أجل تحسين أداء الميزانية الإقليمية. يتمثل أحد الجوانب المهمة في مشكلة إدارة المالية الإقليمية والميزانيات المحلية. الهدف من البحث هو تحديد قياس أداء الحكومة المحلية باستخدام مبدأ القيمة مقابل المال.

يستخدم هذا البحث الطريقة الوصفية النوعية من خلال تحليل البيانات ذات الصلة في شكل بيانات ثانوية ومقابلات تم الحصول عليها من قسم الإدارة الاقتصادية والتنمية في مدينة باتو ومن ثم حساب النسب المستخدمة في طريقة القيمة مقابل المال.

أظهرت النتائج أن النسبة الاقتصادية لحكومة مدينة باتو في عام 2014 إلى عام 2018 كانت أقل من 100 ٪ ، لذلك كان المعنى اقتصاديا. تقل نسبة الكفاءة في الفترة من 2014 إلى 2018 عن 100 ٪ مما يعني أنها فعالة للغاية ، بينما بالنسبة لعام 2015 فهي أكثر من 100 ٪. تعني عدم الكفاءة. نسبة الفعالية في 2014-2018 ، النسبة تزيد عن 100 ٪ مما يعني أنها فعالة ، وهذه هي الحكومة قادرة على إدارة الموارد المالية الإقليمية بشكل صحيح وقادرة على تلبية أهداف الإيرادات الإقليمية. بينما في عامي 2016 و 2017 ، كانت النسبة أقل من 100 ٪ مما يعني أنها غير فعالة ، وهذا هو أن الحكومة لا تستطيع تحقيق هدف الإيرادات الإقليمية .

..

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat seiring di berlakukannya otonomi daerah (Syawali, 2017 Dalam Mustofa, Hal 12). Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 berubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta dilaksanakan sesuai sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam anggaran.

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang tidak efisien, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan instusi yang selalu merugi. Doktrin buruk yang makin melekat pada sebagian besar pelayanan publik di Indonesia salah satunya disebabkan masih kurangnya profesionalisme petugas pada organisasi pelayanan. Kenyataan ini menyadarkan kita semua akan perlunya perhatian khususnya pada peran petugas langsung dalam pelayanan publik. Di era reformasi pengelolaan

keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian pemerintah agar dapat mewujudkan *good governance*. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah (SAP) sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan serta kinerja pemerintah, agar supaya laporan keuangan dan kinerja pemerintah yang dimaksud dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian interen dalam suatu organisasi perusahaan, lembaga organisasi profit maupun non profit mutlak menjadi hal yang utama dan sangat dibutuhkan karena kegiatan operasional dan kinerja memerlukan suatu kebijakan khusus yang mampu mengakomodasi dan memberikan batasan serta ketentuan khusus dalam setiap pelaksanaan kegiatannya.

Setiap organisasi baik bisnis maupun publik menjadikan kinerja sebagai perhatian utama untuk mencapai kinerja yang baik. Kinerja bisa diketahui jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan berupa tujuan-tujuan atau target-target yang hendak ingin dicapai. Pengukuran kinerja harus berdasarkan karakteristik operasional organisasi untuk mendefinisikan indikator dan pengukuran yang digunakan. Pemerintah daerah dituntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasional daerah. Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan

sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. (Zain, 2017: 28)

Perkiraan jumlah alokasi dana untuk setiap unit kerja pemerintahan daerah dan program kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu tingkat pelayanan publik, disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, sehingga identifikasi input, teknik produksi pelayanan publik dan tingkat kualitas minimal yang harus dihasilkan oleh suatu unit kerja menjadi syarat dalam menentukan alokasi dana yang optimal untuk setiap unit kerja pelayanan publik. Pengeluaran Pemerintah Daerah dapat menciptakan ukuran kinerja yang akan mempermudah dalam melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah. Orientasi Pemerintah Daerah pada pembangunan akan lebih dekat dengan gerak dinamis masyarakatnya. Artinya akan bersifat terbuka sehingga tuntutan dan kebutuhan publik masuk dalam penentuan strategi, prioritas dan kebijakan alokasi.

Anggaran daerah merupakan desain teknis untuk pelaksanaan strategi, sehingga apabila pengeluaran pemerintah mempunyai kualitas yang rendah, maka kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah juga cenderung melemah yang berakibat kepada wujud daerah dan Pemerintah Daerah di masa yang akan datang sulit untuk dicapai dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran daerah, salah satu aspek penting adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan pemerintah dilaporkan dengan tepat waktu dan disusun mengikuti standar pemerintah yang secara rasional telah diterima, sehingga setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat mengisyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menyusun dan menyajikannya sesuai dengan standar yang telah diatur dalam perundang-undangan pemerintah, setidaknya dari undang-undang tersebut, pemerintah melalui instansinya harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN atau APBD yang berupa laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Pencatatan laporan keuangan pada suatu instansi berpengaruh pada metodenya. Berbeda metode pencatatannya maka berbeda pula informasi yang akan di hasilkan. Contohnya pada akuntansi persediaan, penerapannya mempunyai dampak pada neraca dan laporan laba/rugi. Laporan laba/rugi dan neraca sangat penting pelaporannya, dikarenakan laporan tersebut sebagai informasi untuk pihak internal maupun pihak eksternal untuk mengambil keputusan seperti investor untuk menilai perusahaan tersebut. Laporan laba/rugi dan neraca paling penting karena laporan

tersebut memberi informasi tentang kinerja perusahaan dalam satu periode akuntansi, dan neraca memberi informasi kinerja perusahaan per tanggal tertentu. Maka kedua laporan tersebut memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Fungsi dari laporan keuangan juga untuk membedakan pendapatan dan transfer dengan biaya yang telah ditetapkan pada laporan keuangan, sehingga dapat merealisasikan transparansi laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, karena standar akuntansi pemerintah tersebut telah mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, dimana tujuan dari sistem akuntansi pemerintahan itu sendiri untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan sistem akuntansi pemerintahan termasuk dalam mendukung pelaksanaan penerapan standar akuntansi tersebut. Penatausahaan keuangan yang dimaksud merupakan pedoman sistem dan prosedur penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang mempunyai kewajiban untuk melakukan kegiatan penatausahaan keuangan atas pendapatan dan belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga semua SKPD dalam melakukan pertanggung jawaban keuangannya mengacu pada pedoman yang telah ada dan ditetapkan.

Konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi merupakan

pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah serta perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan skala moneter. Efisiensi dari pencapaian output yang maksimum dengan *input* tertentu untuk penggunaan input yang terendah dalam mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi, efektivitas dan efisiensi suatu entitas laporan dan membantu menentukan ketentuannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Hak otonomi daerah yang diberikan di Kota Batu akan memberikan ruang untuk mengolah dan meningkatkan sumber pendapatannya sendiri, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah tersebut. Semakin tinggi realisasi pendapatan yang di capai, hendaknya dapat mencerminkan semakin baik kinerja pemerintahan daerah sesuai dengan hasil yang telah di capai. Oleh sebab itu, masyarakat dituntut untuk lebih berfikir kritis terhadap kinerja pemerintah daerah, dibutuhkannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga sektor publik menunjukkan bagaimana uang publik tersebut di gunakan, tetapi juga meliputi

kemampuan memberikan jaminan dari sumber-sumber daya secara ekonomi, efisien dan efektif melalui pelaksanaan manajemen publik yang baik.

Tuntutan yang tinggi pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah dan pengukuran kinerja tersebut mempunyai banyak tujuan. Tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun kinerja yang baik. Sebuah kinerja pada sektor publik dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi publik dalam pencapaian tujuan. Tujuan yang telah dicapai nantinya akan dinilai sebagai bahan penilaian kinerja. Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi dalam penapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan dimasa depan. Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian.

Pengukuran kinerja dalam instansi pemerintah merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Hal ini bertujuan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap instansi pemerintah mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tolak ukur yang telah dibuat (standar minimum pelayanan publik). Ukuran kinerja pemerintah daerah berdasarkan anggaran berbasis kinerja dapat diukur menggunakan konsep *value for money*, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2009: 65). Pada konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk mengantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance* yaitu pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif. Sehingga konsep *value for money* ini sangat dibutuhkan sebagai pendukung pengelolaan keuangan daerah dan dana daerah. Untuk mendukung diberlakukannya pengelolaan dana publik yang berdasarkan *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan dan anggaran daerah yang baik.

Peneliti terdahulu melakukan penelitian yaitu Khikmah (2018) yang berjudul “Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Lamongan Berdasarkan Konsep *Value For Money*” yang menghasilkan informasi bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tidak ekonomis karena menghasilkan rasio lebih dari 100%, artinya pemerintah kurang sukses dalam mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga terjadi pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Dilihat dari efisiensi dan efektivitas, kinerja pemerintah telah efisien dan efektif. Hal ini berarti pemerintah telah mampu mengelola sumber daya keuangan daerah dengan baik dan sukses dalam menentukan target penerimaan daerah. Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan konsep *value for money* diperoleh bahwa rasio ekonomis dari tahun 2009-2013 cenderung tidak ekonomis karena menghasilkan rasio lebih dari 100%. Hal ini berarti pemerintah kurang sukses dalam mengendalikan biaya-biaya yang

dikeluarkan karena biaya yang dikeluarkan lebih besar pada realisasinya daripada yang telah dianggarkan. Tetapi, pemerintah telah berusaha dalam pencapaian kinerja yang ekonomis. Hal ini ditunjukkan dari perkembangan rasio ekonomis meningkat, dan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan efektif jika dilihat dari rasio efektivitas yang dihasilkan dari tahun 2009-2013. Di mana selama periode 5 tahun tersebut, perhitungan rasio menunjukkan hasil lebih dari 100%, yang artinya bahwa pemerintah dalam menentukan target penerimaan telah sukses, dibuktikan dengan pemerolehan realisasi pendapatan yang lebih besar daripada anggaran pendapatannya.

Berdasarkan peneliti terdahulu menurut Hikmah efisien dan efektivitasnya sesuai. Alasan peneliti melakukan penelitian di Bagian Administrasi Ekonomi dan Pembangunan di Kota Batu adalah untuk mengetahui apakah Pemerintah Kota Batu telah mampu dan sukses dalam menentukan keekonomisan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Di Kota Batu dengan perhitungan rasio yang dilakukan dengan berdasarkan konsep *value for money*. Persiapan yang memadai mulai dari peningkatan kemampuan kinerja dan pengadaan sarana dan prasarana yang *kompatibel*, menyiapkan segala macam sistem informasi terkait dengan penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) berbasis akrual. Keadaan ini menjadikan penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul, "PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP *VALUE FOR MONEY* PADA BAGIAN ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KOTA BATU".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian adalah :

Bagaimana mengukur kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan prinsip *value for money* pada Bagian Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yang berbasis pelaksanaan akuntansi pemerintahan maka yang menjadi tujuan adalah:

Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah dengan menggunakan prinsip *value for money* pada Bagian Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Kota Batu.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah Kota Batu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus umpan balik mengenai pengukuran kinerja kepada Pemerintah Kota Batu sehingga dalam melaksanakan program kegiatan di masa depan dapat berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dengan analisis *value for money* dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian empiris.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan menjadi wawasan serta wahana dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari khususnya mengenai akuntansi sektor publik.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Ferina (2017) Dengan Judul Penilaian Kinerja Dengan Menerapkan Indikator *Value For Money* Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kinerja berdasarkan *value for money* pada Kantor Pertanahan Kota Bandung termasuk dalam kategori baik namun berdasarkan analisis penulis diperoleh data bahwa Kantor Pertanahan Kota Bandung belum sepenuhnya menerapkan prinsip ekonomi.

Gare (2017) dengan judul Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan *Value For Money*. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kinerja Klinik Adiwarga Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dengan menggunakan *Value for Money*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran kinerja selama periode 2013-2015 setelah dianalisis *value for money* dapat dikategorikantidak efektif yang berarti bahwa pelayanan konsultasi dan pelayanan medis tidak efektif walaupun jika dilihat dari tingkat kepuasan konsumen sudah memuaskan.

Indiaswari (2017) dengan judul Analisis Value for Money Dalam Pengukuran Kinerja. Tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja Dinas Pertanian

Perkebunan dan Kebutuhan Kabupaten Bayumas dengan menggunakan *value for money*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja dari seluruh kegiatan pada tahun 2014 sampai 2016 menunjukkan cukup ekonomis.

Sari (2018) dengan judul Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money*. Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dengan menggunakan prinsip *value for money* yang didasarkan pada tiga rasio yaitu rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektifitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep secara keseluruhan adalah baik.

Zain (2018) dengan judul Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan *Value For Money*. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengukuran kinerja berdasarkan *value for money*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng termasuk dalam kategori ekonomis. Dengan kata lain Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng berhasil menekan biaya-biaya yang tidak diperlukan, sehingga biaya yang terealisasi lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan pemerintah dilaporkan dengan tepat waktu dan disusun mengikuti standar pemerintah yang secara rasional telah diterima, sehingga setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat mengisyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN atau APBD. Serta menyusun dan menyajikannya sesuai dengan standar yang telah diatur dalam perundang-

undangan pemerintah. Setidaknya dari undang-undang tersebut, pemerintah melalui instansinya harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN atau APBD yang berupa laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tabel 2.1
Tinjauan Laporan Terdahulu

| Nama dan Tahun Peneliti | Judul Penelitian | Tujuan Penelitian | Analisa Data | Metode | Hasil Penelitian |
|--------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------------------|--|
| Ferina (2017) | Penilaian Kinerja Dengan Indikator <i>Value For Money</i> Pada | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin dalam kegiatan operasional secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas | Kepustaka dan Dokumentasi | - Deskriptif - Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan penilaian kinerja berdasarkan <i>value for money</i> pada Kantor Pertanahan Kota Bandung termasuk dalam kategori baik namun berdasarkan analisis penulis diperoleh data bahwa Kantor Pertanahan Kota Bandung belum sepenuhnya menerapkan prinsip ekonomi. |

| Nama dan Tahun Peneliti | Judul Penelitian | Tujuan Penelitian | Analisa Data | Metode | Hasil Penelitian |
|--------------------------------|---|---|---------------------|---------------|--|
| Gare (2017) | Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan <i>Value For Money</i> | mengetahui kinerja Klinik Adiwarga Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dengan <i>Value for Money</i> | Studi Kasus | Kualitatif | Menunjukkan bahwa pengukuran kinerja selama periode 2015-2017 setelah dianalisis <i>value for money</i> dapat dikategorikan tidak efektif yang berarti bahwa pelayanan konsultasi dan pelayanan medis tidak efektif walaupun jika dilihat dari tingkat kepuasan konsumen sudah memuaskan |
| Indiaswari (2017) | Analisis <i>Value for Money</i> Dalam Pengukuran Kinerja | Mengetahui Kinerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kebutuhan Kabupaten Bayumas dengan menggunakan <i>value for money</i> | Studi Kasus | Kuantitatif | Menunjukkan bahwa kinerja dari seluruh kegiatan pada tahun 2015 sampai 2017 menunjukkan cukup ekonomis |
| Sari (2018) | Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan | Mengetahui kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep | Studi Kasus | Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah |

| Nama dan Tahun Peneliti | Judul Penelitian | Tujuan Penelitian | Analisa Data | Metode | Hasil Penelitian |
|-------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------------|---|
| | Menggunakan Prinsip <i>Value For Money</i> | dengan menggunakan prinsip <i>value for money</i> yang didasarkan pada tiga rasio yaitu rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektifitas. . | | | Kabupaten Sumenep secara keseluruhan adalah baik |
| Zain (2018) | Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan <i>Value For Money</i> | untuk mengetahui pengukuran kinerja berdasarkan <i>value for mone</i> . | Kepustakaan dan Dokumentasi | - Deskriptif - Kuantitatif | menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng termasuk dalam kategori ekonomis. Dengan kata lain Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng berhasil menekan biaya-biaya yang tidak diperlukan, sehingga biaya yang terealisasi lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan |

2.1.2
Perbandingan Penelitian Terdahulu

| Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan | Persamaan |
|----------------------|---|---|---|---|
| Ferina (2017) | Penilaian Kinerja Dengan Indikator <i>Value For Money</i> Pada | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kinerja berdasarkan <i>value for money</i> pada Kantor Pertanahan Kota Bandung termasuk dalam kategori baik namun berdasarkan analisis penulis diperoleh data bahwa Kantor Pertanahan Kota | <ul style="list-style-type: none"> - Sumber Data Primer - Variabel pengukuran kinerja sebagai variabel dependen | <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan analisis data Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivita - |
| Gare (2017) | Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan <i>Value For Money</i> | menunjukkan bahwa pengukuran kinerja selama periode 2015-2017 setelah dianalisis <i>value for money</i> dapat dikategorikantidak efektif yang berarti bahwa pelayanan konsultasi dan pelayanan medis tidak efektif walaupun jika dilihat dari tingkat kepuasan konsumen sudah memuaskan | <ul style="list-style-type: none"> - Karakteristik Sistem Akuntansi - Sumber data primer | <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan analisis data Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas - Metode Penelitian Kualitatif |
| Indiaswari (2017) | Analisis <i>Value for Money</i> Dalam Pengukuran Kinerja | menunjukkan bahwa kinerja dari seluruh kegiatan pada tahun 2015 sampai 2017 menunjukkan cukup ekonomis | <ul style="list-style-type: none"> - Sumber Data Primer - Tidak adanya Variabel Intervenin - Variabel pengukuran kinerja sebagai variabel dependen | <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan analisis data Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivita - Metode Penelitian Kualitatif |

| Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan | Persamaan |
|----------------------|---|---|--|---|
| Sari (2018) | Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip <i>Value For Money</i> | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep secara keseluruhan adalah baik | <ul style="list-style-type: none"> - Karakteristik Sistem Akuntansi - Sumber data primer | <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan analisis data Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas - Metode Penelitian Kualitatif |
| Zain (2018) | Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan <i>Value For Money</i> | menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng termasuk dalam kategori ekonomis. Dengan kata lain Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng berhasil menekan biaya-biaya yang tidak diperlukan, sehingga biaya yang terealisasi lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan | <ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya media intervenin - Teknik pengamatan | Metode Penelitian Kualitatif |

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Pengertian Rasio

Keuangan Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan yang paling sering digunakan. Rasio keuangan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan sehingga kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan dapat diinterpretasikan. Menurut Simamora (2000:82) “rasio merupakan pedoman yang berfaedah dalam mengevaluasi posisi dan operasi keuangan perusahaan dan mengadakan perbandingan dengan hasil-hasil dari

tahun-tahun sebelumnya atau perusahaan-perusahaan lain”. Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengetahui apakah telah terjadi penyimpangan dalam melaksanakan aktivitas operasional perusahaan.

Menurut Wild, et al (2005:36) “Rasio merupakan alat untuk menyediakan pandangan terhadap kondisi yang mendasari. Rasio merupakan salah satu titik awal, bukan titik akhir. Rasio yang diinterpretasikan dengan tepat Rasio keuangan menunjukkan hubungan sistematis dalam bentuk perbandingan antara perkiraan-perkiraan laporan keuangan. Agar hasil perhitungan rasio keuangan dapat diinterpretasikan, perkiraan-perkiraan yang dibandingkan harus mengarah pada hubungan ekonomis yang penting. Untuk dapat menginterpretasikan hasil perhitungan rasio keuangan, maka diperlukan adanya pembandingan. Ada dua metode pembandingan rasio keuangan perusahaan menurut Syamsuddin (2000 : 39) yaitu: *Cross-sectional approach* *Cross-sectional approach* adalah suatu cara mengevaluasi dengan jalan membandingkan rasio-rasio antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya yang sejenis pada saat yang bersamaan. *Time series analysis* *Time series analysis* dilakukan dengan jalan membandingkan rasio-rasio finansial perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan rasio keuangan sebagai alat analisis. Hal-hal tersebut akan membantu analisis dalam menginterpretasikan hasil perhitungan rasio keuangan sehingga dihasilkan kesimpulan yang lebih tepat.

Syamsuddin (2000:40) mengemukakan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan rasio keuangan sebagai alat analisis. – Sebuah

rasio saja tidak dapat digunakan untuk menilai keseluruhan operasi yang telah dilaksanakan. Untuk menilai keadaan perusahaan secara keseluruhan sejumlah rasio haruslah dinilai secara bersama-sama. Kalau sekiranya hanya satu aspek saja yang ingin dinilai, maka satu atau dua rasio saja sudah cukup digunakan. – Perbandingan yang dilakukan haruslah dari perusahaan yang sejenis dan pada saat yang sama. Tidaklah tepat kita membandingkan rasio Universitas Sumatera Utara finansial perusahaan A pada tahun 1990 dengan rasio finansial perusahaan B pada tahun 1991. Sebaiknya perhitungan rasio finansial didasarkan pada data laporan keuangan yang telah diaudit (diperiksa).

2.2.2 Rasio Ekonomi

Ekonomis adalah praktik pembelian dengan tingkat kualitas tertentu dengan harga terbaik yang di mungkinkan (*spendingless*). Pengertian ekonomis sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan demikian pada hakekatnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dan ekonomis, karena kedua-duanya menghendaki penghapusan dan penurunan biaya (*cost reduction*). Terjadinya peningkatan biaya mestinya terkait dengan peningkatan manfaat yang lebih besar. Pengukuran tingkat ekonomis memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasi pengeluaran. Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat ekonomi adalah:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100$$

Pengeluaran yang dimaksud dalam rumus tersebut adalah total belanja. Kinerja pemerintah daerah dikatakan ekonomis apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio ekonomi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Adapun kriteria ekonomi dalam pengukuran kinerja keuangan yang diberikan oleh Mahsun (2006) dalam Faridah (2013: 46) dapat dilihat pada tabel 2.2.2

Tabel 2.2.2
Kriteria Ekonomi

| Rasio Ekonomi | Kriteria Ekonomi |
|----------------------|-------------------------|
| Kurang dari 100% | Ekonomis |
| Sama dengan 100 % | Ekonomis Berimbang |
| Lebih dari 100% | Tidak Ekonomis |

Sumber: Mohammad Mahsun, 2006.

2.2.3 Rasio Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan yang serendah-rendahnya (*spending well*).

Efisiensi merupakan hal penting dari tiga pokok bahasan *value for money*. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan (realisasi pengeluaran) dengan realisasi pendapatan yang diterima, formulasinya adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Realisasi belanja yang dimaksud dalam rumus tersebut adalah total belanja. Kinerja pemerintah daerah akan semakin efisien apabila rasio yang dicapai kurang

dari seratus persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Adapun kriteria efisiensi penilaian kinerja keuangan yang diberikan oleh Mahsun (2006:) dalam Faridah (2013: 47) dapat dilihat pada Tabel 2.2.3 di bawah ini.

Tabel 2.2.3
Kriteria Efisiensi

| Rasio Efisiensi | Kriteria Efisiensi |
|-------------------|--------------------|
| Lebih dari 100% | Tidak Efisien |
| Sama dengan 100 % | Efisien Berimbang |
| Kurang dari 100% | Sangat Efisien |

Sumber: Mohammad Mahsun, 2006.

2.2.4 Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tingkat Efektivitas dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat perbandingan anggaran pendapatan dengan realisasinya dan presentase tingkat pencapaiannya.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar seratus persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Kriteria efektivitas

kinerja keuangan dalam Mahsun (2006) dalam Faridah (201: 48) dapat dilihat pada Tabel 2.2.4 di bawah ini:

Tabel 2.2.4
Kriteria Efektivitas

| Rasio Efektivitas | Kriteria Efektivitas |
|-------------------|----------------------|
| Kurang dari 100% | Tidak Efektif |
| Sama dengan 100 % | Efektif Berimbang |
| Lebih dari 100% | Efektif |

Sumber: Mohammad Mahsun, 2006.

2.3 Konsep Pengukuran Kinerja

2.3.1 Pengertian Kinerja

Mangu prawira dan Hubeis dalam Indarti, dkk (2014: 34) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara terencana pada waktu dan tempat dari karyawan serta organisasi bersangkutan. Sedangkan pengertian kinerja karyawan itu sendiri adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara terencana pada waktu dan tempat dari karyawan serta organisasi bersangkutan. Berdasarkan pengertian kinerja dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan merupakan sesuatu yang dicapai oleh karyawan dalam melakukan pekerjaannya, dimana suatu prestasi dapat terlihat dan erat kaitannya dengan hasil pekerjaan seseorang, hasil pekerjaan tersebut dapat menyangkut kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu.

Bernardin dan Russel memberikan pengertian atau kinerja sebagai berikut :

“performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period”. Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu. Pengertian kinerja lainnya dikemukakan

oleh Simanjuntak (2005) yang mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut. (dalam Ruky, 2002: 98)

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program/kebijaksanaan dalam wujud sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang bertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Permendagri No.38 Tahun 2018 (Bab I, Pasal 1:37) menyebutkan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Kinerja merupakan suatu konstruk (*construct*) yang bersifat multidimensional, pengukurannya juga bervariasi tergantung pada kompleksitas faktor-faktor yang membentuk kinerja. Beberapa pihak berpendapat bahwa kinerja mestinya didefinisikan sebagai hasil kerja itu sendiri (*outcomes of work*), karena

hasil kerja memberikan keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategis organisasi, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi.

2.3.2 Konsep Indikator Kinerja

Istilah “Ukuran kinerja” pada dasarnya berbeda dengan istilah “Indikator kinerja”. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Indikator kinerja berdasarkan penyampaian Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (LAN BPKP, 2000) diartikan sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat diukur dan digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja, baik pada tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*ongoing*), maupun setelah kegiatan selesai (*expost*). Indikator kinerja juga dapat digunakan untuk melihat kemajuan dalam hal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintahan. Tanpa indikator kinerja akan menyulitkan pihak yang ingin memberikan penilaian terhadap kinerja dari kebijaksanaan/program/kegiatan instansi pemerintahan, yang pada akhirnya akan menyulitkan memberi penilaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Indra Bastian (2006: 61) mendefinisikan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran

atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*). Hal ini sesuai dengan pendapat Indra Bastian menjelaskan : Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya, Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik, Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung), Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan, Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Pendapat yang diungkapkan Indra Bastian di atas, sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2009: 63) bahwa, “istilah indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja”.

Adapun peran indikator kinerja bagi pemerintah menurut Mardiasmo (2009:64) yaitu: Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi, untuk mengevaluasi target akhir (*final outcome*) yang dihasilkan, sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial, memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan, untuk menunjukkan standar kinerja, untuk menunjukkan efektivitas, untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki

efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran, dan untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya.

2.3.3 Pengukuran Kinerja

Setiap organisasi, baik organisasi yang mencari laba (*profit motive*) maupun yang tidak berorientasi pada laba (*nonprofit motive*) membutuhkan berbagai alat untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh organisasi. Pengukuran kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menghasilkan tujuan, informasi yang relevan pada program kinerja organisasi yang dapat digunakan untuk memperkuat manajemen dan pengambilan keputusan, mencapai hasil dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan, dan meningkatkan akuntabilitas.

Dalam Buku Theodore H. Poister (2003: 87) mengatakan bahwa “*What gets measured gets done*”. Dengan kata lain, pengukuran kinerja cenderung berdampak (memang seharusnya dirancang untuk memiliki dampak) pada perilaku dan keputusan. Pengukuran kinerja cenderung memusatkan perhatian pada apa yang diukur dan bagaimana kinerja itu sendiri, dan untuk memotivasi orang dan organisasi bekerja untuk meningkatkan kinerja, setidaknya pada ruang lingkup yang sedang dipantau. Dengan kata lain, sebuah organisasi akan susah untuk mengetahui bagaimana kinerjanya tanpa melakukan pengukuran kinerja. Ukuran kinerja membantu manajer dan lainnya menilai status kinerja organisasi

mereka dan mengukur kemajuan mereka dalam memberikan program yang efektif. Hal ini sesuai dengan pernyataan, tanpa pengukuran kinerja sebuah organisasi tidak mampu melihat sejauh mana keberhasilan atau kegagalan organisasi tersebut dan dengan pengukuran kinerja organisasi dapat menemukan solusi mengenai kegagalan dari organisasi tersebut. Sehingga ukuran kinerja penting untuk membiarkan manajer mengetahui bagaimana kinerja organisasinya apakah telah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak sehingga mereka dapat bertindak apakah mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya.

Mahmudi (2013: 59) mendefinisikan bahwa Pengukuran kinerja meliputi aktivitas penetapan serangkaian ukuran atau indikator kinerja yang memberikan informasi sehingga memungkinkan bagi unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan *output* dan *outcome* terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu manajer unit kerja dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

Pendapat lain dari Mardiasmo (2009: 66) Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor

publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pengambilan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggung jawaban publik dari memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pasal 31 Ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan satuan kerja perangkat daerah perlu membuat Laporan Realisasi Anggaran guna menilai prestasi kinerja. Begitu pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 memuat bahwa Pemerintah Daerah pada akhir tahun anggaran menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD. Ruang lingkup LKPJ meliputi penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. Tujuan penyusunan LKPJ adalah untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya selama periode tertentu, dan untuk mengetahui peningkatan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan daerah melalui pengawasan DPRD. Mardiasmo (2009: 77) menyatakan manfaat pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik sebagai berikut: Memberi pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati, sebagai alat

komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah Kota Batu sebagai pelaksana amanah mempunyai kewenangan untuk menata dan mengatur masyarakatnya dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Dalam hal ini yang menjadi hak pemerintah adalah menjadi ulil amry dan masyarakat juga diwajibkan mentaati segala yang di perintahkan. Sebagaimana yang termaktub di dalam Kalam Allah yang mewajibkan umatnya untuk mentaati ulil amry dalam surat An-nisa' ayat 58 yang berbunyi :

* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”. (Q.S: An-Nisa: 58)

Ayat tersebut merupakan prinsip-prinsip pokok yang menghimpun ajaran islam tentang kekuasaan dalam pengertian pertanggung jawab terhadap amanahnya serta kekuasaan yang di berikan, dengan sikap adil dan bijaksana. Dan allah merupakan zat diatas segalanya. Hal tersebut menandakan bahwa allah telah mengatur semua sendi-

sendi kehidupan umatnya melalui konstitusi yang ada di dalam al-quran dan menunjukkan adanya syumuliatul islam (kesempurnaan islam).

Dengan begitu pentingnya menjaga amanah tersebut, sehingga tidak semua orang mampu mengemban amanah yang di berikan. Sebagaimana hadis nabi berikut :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تُسْتَعْمَلُنِي قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكَبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِزْبِي وَلِدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا (رواه مسلم)

Artinya :

Dari Abu Dzar ra berkata, Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak menjadikan aku sebagai pengawal? Kemudian beliau menepuk pundakkau dan bersabda, “Hai Abu Dzar, sungguh kamu ini lemah dan jabatan itu amanah. Dan pada hari Kiamat nanti, jabatan itu menjadi kehinaan serta penyesalan, kecuali bagi orang yang melaksanakannya secara benar dan menunaikan semua kewajibannya.” (HR. Muslim)

2.4 Anggaran

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas

atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

Menurut *National Committee on Governmental Accounting (NCGA)* yang saat ini telah menjadi *Governmental Accounting Standards Board (GASB)*, definisi anggaran (*budget*) adalah sebagai berikut :

“... rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.”

Adapun menurut Nordiawan (2006: 51), “anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial”. Jadi pengertian anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan menurut mardiasmo (2009), “anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter”. Dalam bentuk yang paling sederhana anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi

dan perencanaan strategik yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.

Mardiasmo (2009:82) menyatakan bahwa anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*), dimana anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran Sektor Publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari Belanja Pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi ditetapkan, Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya, Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran.

Selain itu anggaran untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang yang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional

program atau kegiatan pemerintah. Selain alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, anggaran digunakan untuk memberi informasi dan meyakinkan Legislatif bahwa Pemerintah bekerja secara efisien, tanpa ada korupsi dan pemborosan. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan, menghitung selisih anggaran (*favourable* dan *unfavourable variances*), menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varians, merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya. Alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik (*political tool*). Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill*, *coalition building*, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer

publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah. Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Sehingga dari hal tersebut berguna untuk memotivasi manajer dan staffnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable*. Maksudnya adalah target anggaran jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

Sebagai ruang publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi

kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisasi akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Pengangguran, tuna wisma dan kelompok lain yang tak terorganisasi akan dengan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot, vandalisme, dan sebagainya.

2.4.1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan:

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.

Proses penyusunan APBD dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), selanjutnya RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun. Berdasarkan RKPD tersebut, pemerintah daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang dijadikan dasar dalam penyusunan APBD. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menerima penyerahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sebelumnya disusun oleh

pemerintah daerah untuk disetujui. Setelah pemerintah daerah menyetujui PPAS, selanjutnya disusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan menjadi APBD. Dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara (Sumarsono, 2010: 74).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu dokumen rencana kinerja dari aspek finansial, dimana anggaran itu yang akan digunakan pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan pembangunan daerahnya. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan dan transfer. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Standar Akuntansi Pemerintahan, struktur APBD merupakan suatu kesatuan.

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar lagi oleh pemerintah. Kelompok pendapatan terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan, Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan Kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, Lain-lain

pendapatan yang sah adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari bantuan dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat.

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Kelompok Belanja terdiri atas Belanja administrasi umum (belanja tak langsung) adalah belanja yang secara tak langsung dipengaruhi program atau kegiatan, Belanja operasi dan pemeliharaan (belanja langsung) adalah belanja yang secara langsung dipengaruhi program atau kegiatan, Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang akan menambah aset, Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan adalah belanja langsung yang digunakan dalam pemberian bantuan berupa uang dengan tidak mengharapkan imbalan, Belanja tak terduga adalah belanja yang langsung dialokasikan untuk kegiatan di luar rencana, seperti terjadinya bencana alam, transfer adalah penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2.5 Akuntansi Pemerintahan

2.5.1 Pengertian Akuntansi Pemerintah

Setiap Intansi Pemerintahan pada saat sekarang ini untuk senantiasa melakukan akuntansi agar pengelolaan keuangan yang di pertanggung jawan dapat terlihat tranparansi dan akuntabilitas. Akuntansi pemerintahan adalah proses pengumpulan, pencatatan, penganalisisan, peringkasan, pengklasifikasi dan pelaporan transaksi keuangan untuk menyediakan informasi keuangan bagi pemakai untuk pengambilan keputusan. (Pemerintahan sebagai organisasi yang memegang peranan sangat penting dan paling utama dalam pemberian jasa dan pelayanan kepada masyarakat mempunyai lingkungan yang berbeda dengan sektor swasta. Hal ini menjadi pertimbangan dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan ,karena akuntansi pemerintah saat ini akan menuju pada akuntansi yang transparansi dan akuntabel. (Sumarsono, 2010: 36)

Pemerintahan sebagai organisasi yang memegang peranan sangat penting dan paling utama dalam pemberian jasa dan pelayanan kepada masyarakat mempunyai lingkungan yang berbeda dengan sektor swasta. Hal ini menjadi pertimbangan dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan, karena akuntansi pemerintah saat ini akan menuju pada akuntansi yang transparansi dan akuntabel.

2.5.2 Fungsi akuntansi Pemerintahan

Dalam kaitanya dengan Pengelolaan Keuangan, Akuntansi Pemerintahan berfungsi sebagai berikut Akuntabilitas maksudnya, yaitu untuk mempertanggung jawabkan pengurusan keuangan negara, manajerial maksudnya dapat di

pergunakan untuk, perencanaan, analisis dan penelitian program penganggaran, menilai pengurusan yang efektif berbagai tingkat pemerintahan, pengendalian biaya. (Gede (2000) dalam Afiati, 2011: 79).

Dengan adanya sistem akuntansi pemerintahan dapat memberikan arahan yang jelas bagi Pengelola Keuangan Pemerintah agar dapat pelaksanaannya tepat sesuai dengan yang di rencanakan dan juga dapat mengendalikan atas biaya keuangan yang di keluarkan untuk kegiatan operasional. Untuk menjaga kelangsungan akuntansi pemerintahan di perlukan sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan akuntansi agar pada setiap kegiatan dapat dievaluasi dan teranalisis sesuai tingkat keberhasilan kegiatan. Tujuan akuntansi pemerintahan yang telah di rumuskan dalam peraturan perundang-undangan, maka dalam pelaksanaan anggaran, yaitu dengan tujuan umum menyediakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan, memberikan pertanggung jawaban, menyediakan informasi untuk mengevaluasi kinerja dari pimpinan dan organisasi pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, akuntansi pemerintahan juga menekankan pada akuntabilitas pada ketujuh prinsip pokok yang mendasari akuntansi dari laporan keuangan atas kegiatan pemerintahan yang menuju pada pemerintahan yang baik. Adapun prinsip-prinsip pokok pada dasarnya dikelompokkan, laporan Akuntabilitas Akuntansi. Sistem Akuntansi Pemerintahan harus mememuhi dua hal yaitu menyajikan laporan keuangan secara benar dengan ungkapan lengkap atas posisi keuangan dan hasil kegiatan, menetapkan dan menunjukkan ketaatan pada perundang-undangan yang berhubungan dengan keuangan negara.

2.5.3 Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Mahsun, 2013:22)

الْخَيْرَاتِ فَعَلَّ إِلَيْهِمْ وَأَوْحَيْنَا بِأَمْرِنَا يَهْدُونَ أَيْمَةً وَجَعَلْنَاهُمْ
عَبِيدِينَ لَنَا وَكَانُوا الزَّكَاةَ وَإِتَاءَ الصَّلَاةِ وَإِقَامَ

Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. (AlAnbiya':73)

2.5.4 Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disusun untuk menyediakana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan, akuntabilitas yang membantu pengguna para pengelola sumber daya serta suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga tercapai tujuan yang ditetapkan secara periodik, manajemen yang membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk

memudahkan fungsi perencanaan pengelolaan atas seluruh aset kewajiban serta dana, transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka, keseimbangan. Antar generasi membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan, evaluasi kinerja mengevaluasi kinerja entitas pelapor, terutama dalam penggunaan sumberdaya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.6 Value For Money

2.6.1 Pengertian Value For Money

Value for money menurut Mardiasmo (2009: 67) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi merupakan pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah serta perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan skala moneter. Efisiensi dari pencapaian output yang maksimum dengan *input* tertentu untuk penggunaan input yang terendah dalam mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

2.6.2 Value For Money Sebagai Metode Penilaian Kinerja

Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi

melalui alat ukur finansial dan non finansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud ,membantu memperbaiki kinerja pemerintah, pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

2.6.3 Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan *Value For Money*

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah dan sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Permasalahan yang sering muncul adalah sulitnya mengukur output karena output yang dihasilkan pemerintah tidak selalu berupa output yang berwujud (*tangible output*), tetapi kebanyakan juga bersifat output tidak berwujud (*intangible output*). Ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan indikator kinerja. Perbedaan antara ukuran kinerja dengan indikator kinerja adalah Ukuran kinerja, pada umumnya mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, misalnya laporan keuangan

pemerintah, indikator kinerja, mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.

Mekanisme penentuan indikator kinerja membutuhkan, sistem perencanaan dan pengendalian. Meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan keseluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando, spesifikasi teknis dan standarisasi. Spesifikasi ini digunakan sebagai ukuran kinerja kegiatan, program dan organisasi, kompetensi teknis dan profesionalisme. Personil yang memiliki kompetensi dan profesional merupakan jaminan dukungan dalam pekerjaan, mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar, mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian reward dan punishment yang bersifat finansial. Sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya, mekanisme ini digunakan untuk memperbaiki kinerja personil dan organisasi. (Hariyanto & Arifuddin, 2007: 16)

2.6.4 Langkah-langkah Pengukuran *Value For Money*

Pengukuran Ekonomi, pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan (input) yang digunakan. Pengukuran Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Cara perbaikan terhadap efisiensi adalah: meningkatkan output pada tingkat input yang sama, meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input, menurunkan input pada tingkatan output yang sama, menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output, pengukuran efektifitas ,efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas

tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, pengukuran Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat atau mengukur kualitas output terhadap dampak yang dihasilkan. Pengukuran outcome memiliki dua peran yaitu peran retrospektif, terkait dengan penilaian kinerja masa lalu dan Peran Prospektif, terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang. Dalam peran ini, pengukuran outcome digunakan untuk mengarahkan keputusan alokasi sumber daya publik, Estimasi Indikator Kinerja, suatu unit organisasi perlu melakukan estimasi untuk menentukan target kinerja yang ingin dicapai pada periode mendatang. Penentuan target tersebut didasarkan pada perkembangan cakupan layanan atau indikator kinerja.

2.6.5 Tujuan *Value For Money*

Tujuan pelaksanaan *value for money* adalah, ekonomi hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya. efisiensi: Berdaya guna dalam penggunaan sumber daya efektivitas berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. equity: Keadilan dalam mendapatkan pelayanan publik. *equality*: Kesetaran dalam penggunaan sumber daya. Tujuan lain yang dikehendaki terkait pelaksanaan *value for money* untuk peningkatan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran sehingga dari hal tersebut dapat meningkatkan mutu pelayanan publik sesuai yang direncanakan. Tentunya ketika program yang direncanakan sesuai dengan perencanaan alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik sehingga dapat meningkatkan kesadaran

akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

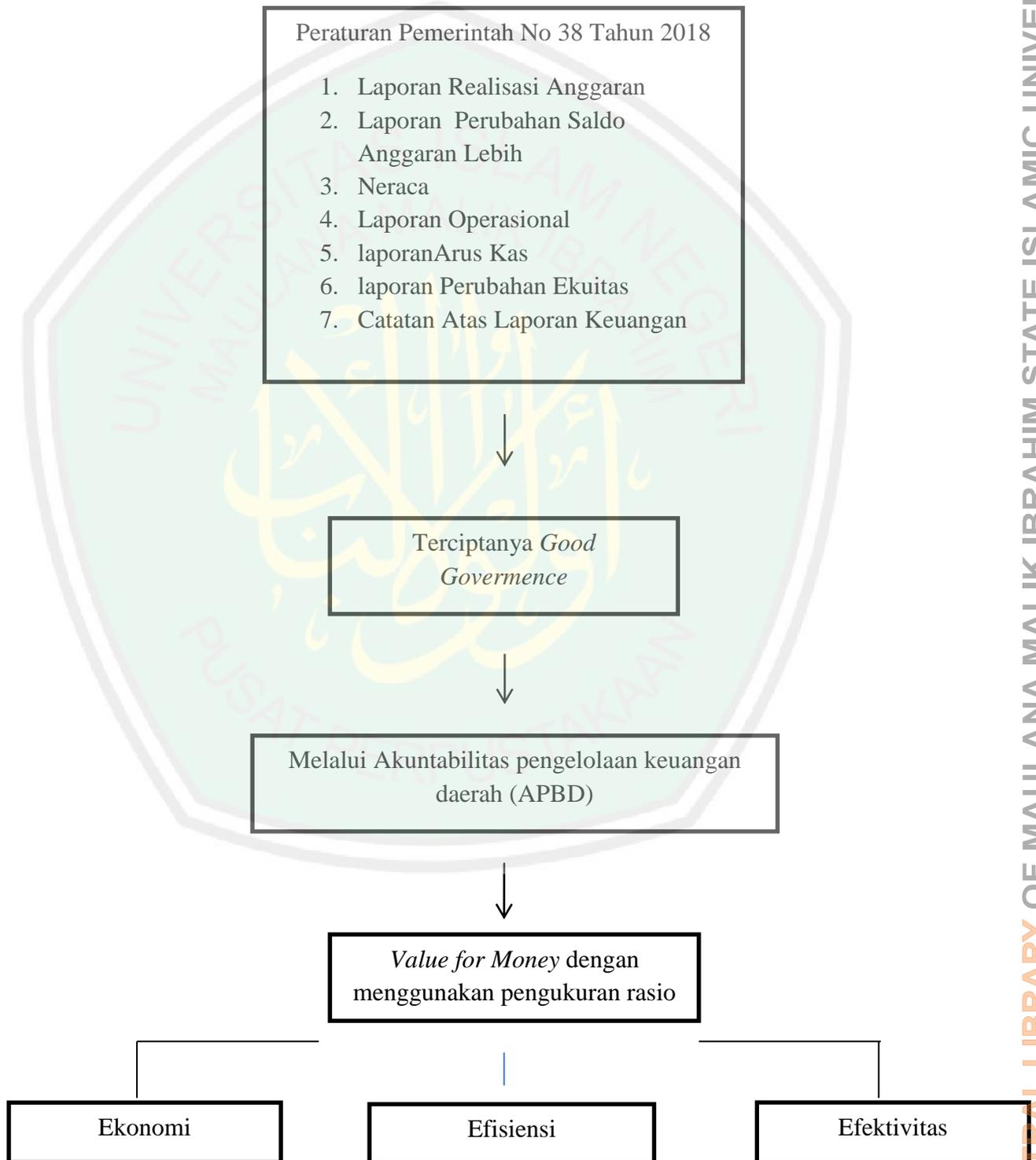
2.6.6 Kerangka Berfikir

Salah satu tujuan dikeluarkannya undang-undang dan peraturan pemerintah terkait otonomi daerah adalah tercapainya akuntabilitas publik, atau pengelolaan keuangan yang dipercayakan pada setiap daerah (APBD), yang cakupannya diharapkan akan terealisasinya pemerintahan yang baik (*good govermen*). Untuk mengetahui akuntabilitas tersebut dengan dilakukannya suatu pengukuran kinerja dengan menggunakan pendekatan dan metode *value for money* yang dijelaskan hubunagn optimal antara biaya/ sumber daya serta manfaat yang disampaikan melalui proses yang mengubah *input* melalui kegiatan menjadi *output* yang diperlukan untuk memicu hasil (*income*) yang baik. oleh karena hal tersebut dalam penelitian ini, penulis akan mengukur seberapa ekonomis, efisien, dan efektivnya Pemerintah Kota Batu dalam mengelola keuangannya.

Bentuk skala pengukuran yang akan dirancang menjadi kerangka berpikir yang terakurasi, melalui pengukuran yang faktual sehingga mampu menjadi acuan dalam pertimbangan keputusan guna meningkatkan kinerja pemerintah yang baik. Sehingga perlu ditekankan bahwa akuntansi keuangan yang meliputi pelaksanaan laporan keuangan dan menganalisis laporan keuangan tersebut dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2018 yang terdiri dari: Laporan Realisasi, Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan dan *Valur fo Money* kemudian ditarik kesimpulan, apakah sudah sesuai dengan

aturan yang berlaku ats standar yang berlaku dan apakah sudah ekonomis efektif dan efisien.

Gambar 2.6.6
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Perancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu. Dasar penelitian kualitatif merupakan *konstruktivisme* ialah pengumpulan data dengan berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran ialah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelahan terhadap orang-orang melalui interkasinya dengan situasi sosial mereka. (Paton, 2002: 53)

Jika dilihat dari tempat penelitian, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan yang berusaha meneliti atau melakukan studi observasi. Dengan demikian data konkrit dari sata primer dan sekunder yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan sebagai kesimpulan akhir dari hasil observasi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Batu di Jalan Panglima Sudirman No. 507, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu. Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan. alasan peneliti melakukan penelitian di Bagian administrasi Ekonomi dan Pembangunan di Kota Batu adalah untuk mengetahui apakah Pemerintah Kota Batu mampu dan sukses dalam menentukan keekonomisan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Di Kota Batu dengan perhitungan rasio yang di lakukan dengan berdasarkan

konsep *value for money*. Persiapan yang memadai mulai dari peningkatan kemampuan kinerja dan pengadaan sarana dan prasarana yang *kompatibel*, menyiapkan segala macam sistem informasi terkait dengan penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) berbasis akrual.

3.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini subjeknya pada Bagian administrasi dan Pembangunan Kota Batu.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

a. Data Primer

Data ini diperoleh langsung dari penelitian lapangan dengan pengamatan langsung pada Bagian administrasi dan Pembangunan Kota Batu serta mengadakan wawancara secara langsung untuk mencari penjelasan dan keterangan pada Pemerintahan Kota Batu.

b. Data Sekunder

Data ini penulis peroleh dari berbagai sumber yang telah ada, termasuk dokumen yang telah ada di Bagian administrasi dan Pembangunan Kota Batu dan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur-literatur serta dari sumber lain yang berhubungan dan relevan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan keuangan dari Bagian administrasi dan Pembangunan Kota Batu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Survey lapangan

a. Pengamatan

Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap laporan data sekunder .

b. Wawancara

Dalam penelitian ini di lakukan wawancara kepada Kepala dan Wakil Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Batu Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumentasi (Hasan, 2000).

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan APBD dan Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota Batu.

3.5.2 Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian yang dilakukan dengan mempelajari teori dan konsep yang sehubungan dengan masalah yang diteliti pada buku, literatur, ataupun artikel akuntansi, guna memperoleh landasan teoretis untuk melakukan pembahasan.

3.6 Metode Analisis

Data Metode analisis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif Kualitatif (*Descriptive qualitative Analysis Method*). Menurut Nazir (2005) dalam bukunya Metode Penelitian, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif serta tujuannya adalah sebagai berikut.

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.”

Metode deskriptif kualitatif ini merupakan analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul secara kuantitatif didasarkan pada prinsip *value for money*. Metode tersebut digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah sehingga dapat diketahui bagaimana kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan rasio ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Untuk lebih jelasnya, pengukuran *Value For Money* sebagai berikut.

3.6.1 Rasio Ekonomi

Ekonomis adalah praktik pembelian dengan tingkat kualitas tertentu dengan harga terbaik yang dimungkinkan (*spendingless*). Pengertian ekonomis sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan demikian pada hakekatnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dan ekonomis, karena kedua-duanya menghendaki penghapusan dan penurunan biaya (*cost reduction*). Terjadinya peningkatan biaya mestinya terkait dengan peningkatan manfaat yang lebih besar. Pengukuran tingkat ekonomis memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasi pengeluaran. Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat ekonomi adalah:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Pengeluaran yang dimaksud dalam rumus tersebut adalah total belanja. Kinerja pemerintah daerah dikatakan ekonomis apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio ekonomi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Adapun kriteria ekonomi dalam pengukuran kinerja keuangan yang diberikan oleh Mahsun (2006) dalam Faridah (2013: 46) dapat dilihat pada tabel 3.6.1

Tabel 3.6.1
Kriteria Ekonomi

| Rasio Ekonomi | Kriteria Ekonomi |
|-------------------|--------------------|
| Kurang dari 100% | Ekonomis |
| Sama dengan 100 % | Ekonomis Berimbang |
| Lebih dari 100% | Tidak Ekonomis |

Sumber: Mohammad Mahsun, 2006.

3.6.2 Rasio Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan yang serendah-rendahnya (*spending well*).

Efisiensi merupakan hal penting dari tiga pokok bahasan *value for money*. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan (realisasi pengeluaran) dengan realisasi pendapatan yang diterima, formulasinya adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Realisasi belanja yang dimaksud dalam rumus tersebut adalah total belanja. Kinerja pemerintah daerah akan semakin efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Adapun kriteria efisiensi penilaian kinerja keuangan yang diberikan oleh Mahsun (2006) dalam Faridah (2013: 47) dapat dilihat pada Tabel 3.6.2 dibawah ini.

Tabel 3.6.2
Kriteria Efisiensi

| Rasio Efisiensi | Kriteria Efisiensi |
|------------------------|---------------------------|
| Lebih dari 100% | Tidak Efisien |
| Sama dengan 100 % | Efisien Berimbang |
| Kurang dari 100% | Sangat Efisien |

Sumber: Mohammad Mahsun, 2006

3.6.3 Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tingkat Efektivitas dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat perbandingan anggaran pendapatan dengan realisasinya dan presentase tingkat pencapaiannya.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar seratus persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Kriteria efektivitas kinerja keuangan dalam Mahsun (2006) dalam Faridah (2013: 48) dapat dilihat pada Tabel 3.6.3 di bawah ini.

Tabel 3.6.3
Kriteria Efektivitas

| Rasio Efektivitas | Kriteria Efektivitas |
|--------------------------|-----------------------------|
| Kurang dari 100% | Tidak Efektif |
| Sama dengan 100 % | Efektif Berimbang |
| Lebih dari 100% | Efektif |

Sumber: Mohammad Mahsun, 2006.

3.7 Tahap-tahap Analisis Data

- a) Persiapan data sekunder yang diperoleh dari Bagian administrasi Ekonomi dan Pembangunan Kota Batu.

b) Perhitungan rasio-rasio yang digunakan dalam metode *value for money*. Rasio yang digunakan mencakup 3 hal pokok yaitu :

- Rasio Ekonomi berhubungan dengan aspek pengelolaan,
- Rasio Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan,
- Rasio Efektivitas berbicara tentang mengkaji ukuran dari suatu organisasi atau pemerintahan dalam mencapai tujuannya..

Ketiga elemen rasio yang akan digunakan sangat berkaitan dan berurutan sehingga dapat dijadikan acuan dalam penelitian yang akan dilakukan

- c) Implementasi dan proses penyajian data berupa analisis dalam bentuk uraian singkat, sehingga peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan dengan penguasaan data yang telah di peroleh. Dengan demikian peneliti dapat memutuskan untuk pengambilan tindakan lebih lanjut atau cukup dalam mencari data.
- d) Kesimpulan yang harus dinyatakan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Wilayah Kota Batu

Kota Batu sudah terkenal sejak abad ke IX akhir Masehi, sebagai Kota Wisata karena keindahan pemandangan alamnya. Kota yang terletak sekitar 19 km sebelah barat Kota Malang dan memakan waktu kurang lebih 2 jam dari Kota Surabaya ini memiliki ketinggian antara 680 m sampai 1700 m di atas permukaan air laut serta suhu udara berkisar antara 15° sampai dengan 19° Celcius. Udara segar nan sejuk dan dikelilingi bukit-bukit indah menjadi daya tarik tersendiri jika dibanding kota-kota lain di Indonesia. Kota Batu yang pernah dijuluki De Kleine Switzerland atau Swiss Kecil di Pulau Jawa mempunyai banyak potensi wisata menawan, antara lain Lembah Songgoriti, Pasar Malam, Wisata Wana, Selecta, Wisata Desa, Jawa Timur Park, Wisata Bangunan Kuno, Wisata Agro dan masih banyak lagi.

Pada tanggal 6 Maret 1993 Kota administrasi Batu dibentuk dan diresmikan (sebelumnya merupakan kecamatan bagian wilayah Kota batu). Pada tanggal 10 April 1995 Surat persetujuan DPRD Kab. Malang dan Walikota Malang tentang peningkatan status kota administratif Batu menjadi pemerintah kota Batu, kemudian pada tanggal 11 April 1995 pengusulan kepada gubernur tentang peningkatan status kota administratif menjadi pemerintah kota. 6 Juni 1996 Dengan persetujuan DPRD kota Malang dan surat Walikota Malang disertai surat

Pembantu Gubernur di Malang, Batu mengusulkan peningkatan status dari Kotif menjadi pemerintah kota ke gubernur Jawa Timur. Pada tanggal 12 Januari 2001 Melalui proses yang panjang, maka setelah pemilu 1999 terbit Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD propinsi dan Kabupaten/Kota. Pada tanggal 28 Februari 2001 Keputusan Menteri Dalam negeri dan Otonomi Daerah pada tentang petunjuk Pelaksanaan Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten / Kota. Pada tanggal 21 Juni 2001 Batu resmi menjadi Kota berdasarkan UU No 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. Kota Batu merupakan salah satu bagian dari wilayah Jawa Timur.

Kota dengan Luas 202,800 Km² atau sama dengan 20,280 ha ini, berbatasan dengan :

Sebelah Selatan : Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir

Sebelah Barat : Kecamatan Pujon

Sebelah Timur : Kecamatan Karang plosor dan Kecamatan Dau

Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Prigen

Pembagian wilayah kota Batu terdiri dari 3 kecamatan dan 23 desa/kelurahan. Ketiga kecamatan itu adalah : Kecamatan Batu dengan luas 46,377 Km², Kecamatan Bumiaji dengan wilayah yang paling luas, yaitu sekitar 130,189 Km², dan Kecamatan Junrejo dengan luas 26,234 Km². Dilihat dari keadaan geografinya, Kota Batu terletak pada posisi 122°17',10,90" – 122°57',00,00" Bujur Timur dan 7°44',55,11" – 8°26'35,45" Lintang Selatan. Kota Batu memiliki

luas wilayah sebesar 199,087 km² yang terbagi menjadi 3 kecamatan dengan luasan sebagai berikut :

Kecamatan Batu = 45,458 km²

Kecamatan Junrejo = 25,650 km²

Kecamatan Bumiaji = 127,979 km²

4.1.1.1 Topografi Kota Batu

Kota Batu terletak pada ketinggian antara 600 sampai dengan 1.700 m.dpl. Secara topografi Kota Batu terbagi menjadi 3 bagian yaitu dataran tinggi dengan bentuk wilayah datar sampai berombak, berombak sampai berbukit, dan bentuk berbukit sampai bergunung. Keadaan topografi ini menunjukkan di wilayah bagian selatan terutama di Kecamatan Junrejo cenderung agak mendatar, kecuali Desa Pendem dan Desa Dadaprejo yang membentuk lembah pada Sungai Brantas dan anak sungainya. Pada bagian utara yaitu pada daerah hutan lindung dan daerah Cangar, kondisi topografinya relatif terjal karena berada pada kawasan berbukit dan bergunung dengan ketinggian lebih dari 700 mdpl hingga 1.900 mdpl. Kondisi ini memiliki potensi untuk pariwisata dengan pemandangan alam yang sangat indah dan udara yang sejuk.

4.1.1.2 Kemiringan Kota Batu

- Kemiringan 0-8° merupakan kawasan yang layak untuk kegiatan budidaya pertanian hortikultura dan tanaman pangan selain kegiatan pemukiman.

- Kemiringan 8-15° merupakan kawasan yang layak untuk dikembangkan pertanian perkebunan.
- Kemiringan 15-40° sebagian besar merupakan kawasan yang dikembangkan hutan produksi.
- Kemiringan di atas 40° merupakan kawasan lindung mutlak.

4.1.1.3 Pemanfaatan Lahan di Kota Batu

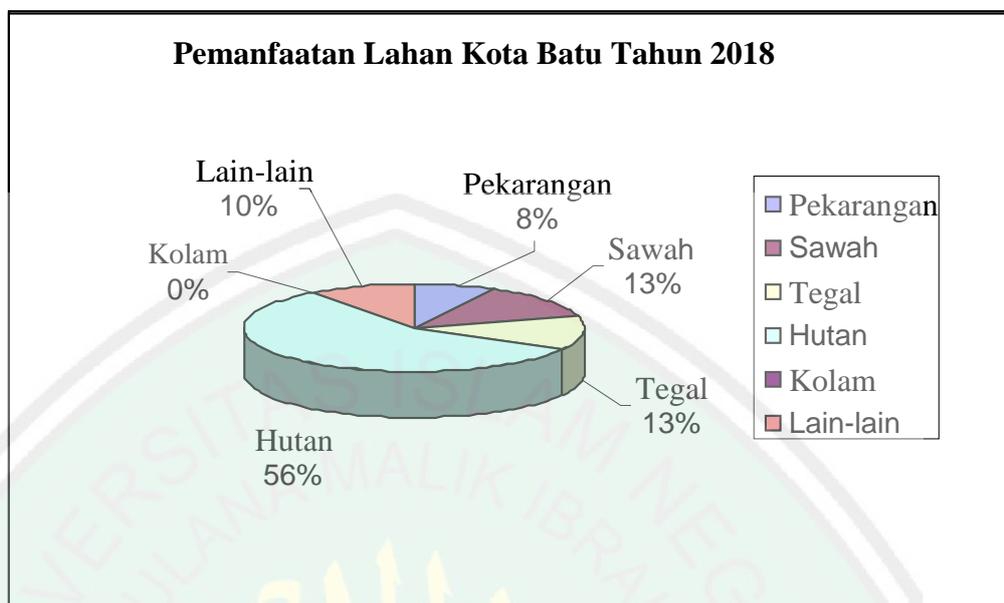
Dari data pemanfaatan lahan di Kota Batu, dapat dikatakan bahwa Kota Batu merupakan kota yang berbasis pertanian. Hal ini dapat dibuktikan dari pemanfaatan lahan yang ada. Sebesar 25,55% pemanfaatan lahan digunakan untuk budidaya tanaman yaitu berupa sawah (12,70%) dan tegal (12,85%). Selain itu angka yang cukup signifikan pula terdapat pada sektor hutan dengan besaran mencapai 56,62%. Hutan yang dimaksud terdiri atas hutan negara dan hutan rakyat. Keberadaan wilayah hutan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi terutama dikarenakan letak hutan yang sebagian besar terdapat pada dataran tinggi yaitu di Kecamatan Bumiaji. Pemanfaatan yang lain yaitu untuk pekarangan (pemukiman) sebesar 7,91%, kolam 0,01% dan lain-lain sebesar 9,93%.

Tabel 4.1.
Pemanfaatan Lahan Kota Batu Tahun 2018

| Kec. | Pekarangan | Sawah | Tegal | Hutan | Kolam | Lain-lain | Total |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| Batu | 526,41 | 594,00 | 776,56 | 1.615,00 | 0,48 | 1.033,36 | 4.545,81 |
| Bumiaji | 788,68 | 825,00 | 1.253,81 | 9.026,60 | 0,19 | 903,61 | 12.797,89 |
| Junrejo | 258,74 | 1.109,00 | 527,37 | 630,01 | 0,88 | 39,02 | 2.565,02 |
| TOTAL | 1.573,83 | 2.528,00 | 2.557,74 | 11.271,61 | 1,55 | 1.975,99 | 19.908,72 |

Sumber data di olah dari laporan keuangan Kota Batu tahun 2019

Gambar 4.1 Komposisi Pemanfaatan Lahan di Kota Batu Tahun 2018



Sumber data di olah dari laporan keuangan Kota Batu tahun 2019

4.1.1.4 Sumber Daya Manusia

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, perkembangan jumlah penduduk di Kota Batu juga tumbuh relatif pesat. Selain karena adanya kelahiran juga adanya pendatang dari luar Kota Batu. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 1 dimana dalam kurun waktu satu tahun jumlah penduduk Kota Batu meningkat sebanyak 4.916 jiwa dari total 202.574 jiwa pada tahun 2017 menjadi 207.490 jiwa pada tahun 2018. Dari jumlah tersebut jumlah laki-laki selalu lebih banyak dari perempuan walaupun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Dari ketiga kecamatan yang ada, kecamatan Batu memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi karena di Kecamatan Batu selain terdapat pusat pemerintahan juga terdapat fasilitas-fasilitas umum seperti pasar, rumah sakit, alun-alun, dan lain-lain.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kota Batu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

| Kec. | Laki-Laki (Jiwa) | | Perempuan (Jiwa) | | Jumlah (Jiwa) | |
|--------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| Batu | 48.201 | 49.447 | 47.368 | 48.628 | 95.569 | 98.075 |
| Bumiaji | 29.214 | 29.666 | 28.628 | 29.123 | 57.842 | 58.789 |
| Junrejo | 24.734 | 25.541 | 24.429 | 25.085 | 49.163 | 50.626 |
| TOTAL | 102.149 | 104.654 | 100.425 | 102.836 | 202.574 | 207.490 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, 2018

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa hampir separuh penduduk Kota Batu tidak atau belum bekerja yaitu sebanyak 47%. Hal ini dimungkinkan dengan banyaknya jumlah ibu rumah tangga, manula dan anak-anak di Kota Batu. Sebagian besar penduduk Kota Batu bekerja disektor swasta seperti bidang transportasi, industri, perdagangan, dan lain-lain yaitu sebesar 20% sedangkan yang bekerja disektor pertanian sebesar 15% yaitu sebanyak 30.221 orang yang terbagi atas petani dan buruh tani. Pertanian yang dimaksud disini adalah pertanian dalam arti luas yaitu pertanian, peternakan dan perikanan. Sisanya penduduk Kota Batu bekerja sebagai PNS, TNI/POLRI, dan lain-lain.

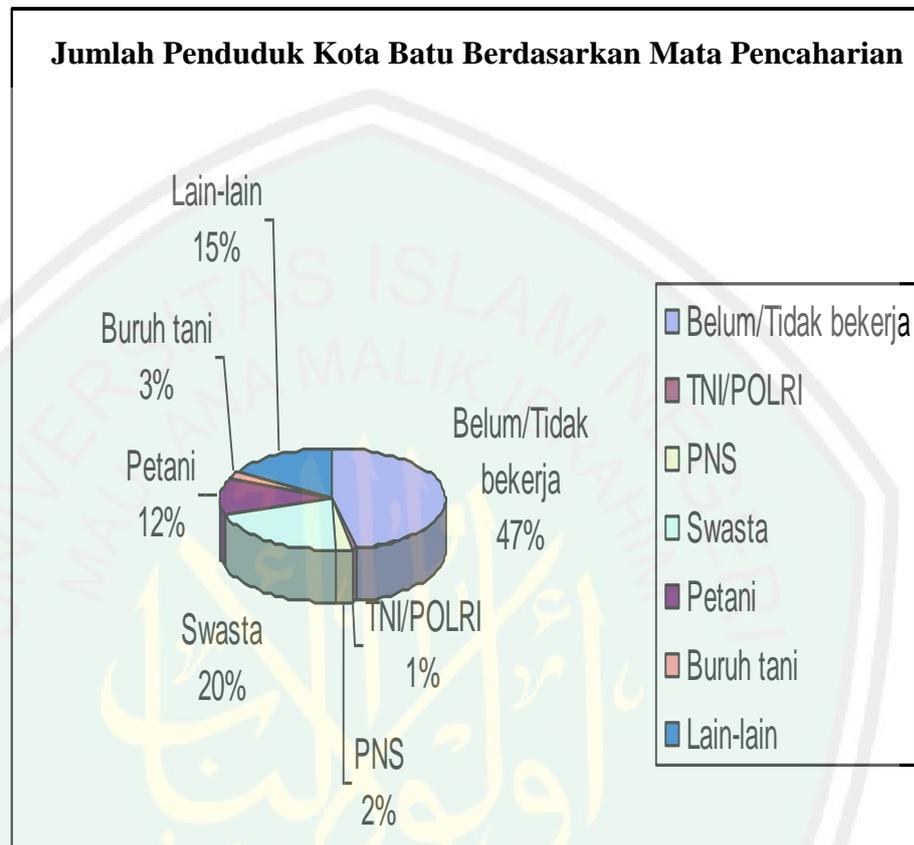
Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Kota Batu Berdasarkan Jenis Pekerjaan

| No. | Pekerjaan | Kecamatan | | | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| | | Batu | Bumiaji | Junrejo | |
| 1 | Belum/Tidak bekerja | 47.712 | 24.964 | 23.884 | 96.560 |
| 2 | TNI/POLRI | 286 | 84 | 900 | 1.270 |
| 3 | PNS | 2.878 | 794 | 1.247 | 4.919 |
| 4 | Swasta | 23.095 | 8.962 | 10.452 | 42.509 |
| 5 | Petani | 6.329 | 13.091 | 5.503 | 24.923 |
| 6 | Buruh tani | 896 | 3.558 | 844 | 5.298 |
| 7 | Lain-lain | 16.879 | 7.336 | 7.796 | 32.011 |
| TOTAL | | 98.075 | 58.789 | 50.626 | 207.490 |

Sumber data di olah dari laporan keuangan Kota Batu tahun 2019

Gambar 4.3

Jumlah Penduduk Kota Batu Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2018



Sumber data di olah dari laporan keuangan Kota Batu tahun 2019

4.1.2 Badan Keuangan Daerah Kota Batu

Tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Batu yaitu Badan Pengelola Keuangan Kota Batu mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan Pengelola keuangan dan aset daerah yang meliputi penyusunan rancangan APBD, Perubahan APBD, Penatausahaan APBD, akuntansi keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan pembinaan administrasi Pengelola keuangan SKPD/Desa. Badan Pengelolaan Keuangan (BKD) merupakan instansi pemerintahan yang bertugas mengelola keuangan daerah mulai dari perencanaan

sampai pada pertanggung jawaban Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Batu. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu. Serta Peraturan Walikota Batu Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu

4.2 Analisa Data

Pada sub bagian ini akan diuraikan satu-persatu variabel penelitian terhadap perusahaan sampel penelitian pada periode penelitian. Pada sub bagian ini akan diuraikan satu-persatu variabel penelitian terhadap perusahaan sampel penelitian pada periode penelitian. Metode deskriptif kualitatif ini merupakan analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul secara kuantitatif didasarkan pada prinsip *value for money*. Metode tersebut digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah sehingga dapat diketahui bagaimana kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan rasio ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

4.2.1 Rasio Ekonomi

Ekonomis adalah praktik pembelian dengan tingkat kualitas tertentu dengan harga terbaik yang dimungkinkan (*spendingless*). Pengertian ekonomis sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan demikian pada hakekatnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dan

ekonomis, karena kedua-duanya menghendaki penghapusan dan penurunan biaya (*cost reduction*). Terjadinya peningkatan biaya mestinya terkait dengan peningkatan manfaat yang lebih besar. Pengukuran tingkat ekonomis memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasi pengeluaran. Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat ekonomi adalah:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ekonomi Tahun 2014} &= \frac{\text{Rp.632.737.653.548}}{\text{Rp.792.186.217.513,37}} \times 100\% \\ &= 79,8\% \end{aligned}$$

Perhitungan Rasio ekonomis adalah perbandingan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran. Rasio ekonomis untuk tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Rasio Ekonomi
Tahun 2014-2018

| Tahun | Realisasi Pengeluaran | Anggaran Pengeluaran | Rasio Ekonomi |
|-------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 2014 | 632.737.653.548,00 | 792.186.217.513,37 | 79.87% |
| 2015 | 819.751.076.487,00 | 906.534.291.912,15 | 90.43% |
| 2016 | 780.506.520.832,98 | 859.790.122.051,82 | 90.78% |
| 2017 | 728.120.377.965,85 | 876.795.937.467,49 | 83.04% |
| 2018 | 766.876.197.709,40 | 977.977.886.342,87 | 78.41% |

Sumber data di olah dari laporan keuangan Kota Batu tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa rasio ekonomi untuk tahun 2014 sebesar 79,87%, tahun 2015 sebesar 90,43%, tahun 2016 sebesar 90,78%, tahun 2017 sebesar 83,04% dan 78.41%. Rasio ekonomi tahun 2014-2018 mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan 2016 sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 cenderung mengalami penurunan. Peningkatan rasio ekonomi tahun 2015 sebesar

10,46% dikarenakan karena adanya kenaikan realisasi pengeluaran dari tahun 2014 sebesar Rp. 632.737.653.548,00 tahun 2015 menjadi Rp. 819.751.076.487,00 diikuti oleh peningkatan anggaran pengeluaran dari tahun 2014 sebesar Rp. 792.186.217.513,37 tahun 2015 menjadi Rp. 906.534.291.912,15.

Pada tahun 2016 rasio ekonomi mengalami peningkatan sebesar 0,35%, peningkatan ini disebabkan oleh penurunan realisasi pengeluaran tahun 2015 Rp. 819.751.076.487,00 tahun 2016 menjadi Rp. 780.506.520.832,98 diikuti penurunan anggaran pengeluaran tahun 2015 sebesar Rp. 906.534.291.912,15 tahun 2016 menjadi Rp. 859.790.122.051,82.

Pada tahun 2017 rasio ekonomi mengalami penurunan sebesar 7,74%, penurunan ini disebabkan oleh penurunan realisasi pengeluaran tahun 2016 Rp. 780.506.520.832,98 tahun 2016 menjadi Rp. 728.120.377.965,85 diikuti kenaikan anggaran pengeluaran tahun 2017 sebesar Rp. 859.790.122.051,82 tahun 2016 menjadi Rp. 876.795.937.467,49.

Pada tahun 2018 rasio ekonomi mengalami penurunan sebesar 4,63%, penurunan ini disebabkan oleh penurunan realisasi pengeluaran tahun 2017 Rp. 728.120.377.965,85 tahun 2018 menjadi Rp. 766.876.197.709,40 diikuti kenaikan anggaran pengeluaran tahun 2017 sebesar Rp. 876.795.937.467,49 tahun 2018 menjadi Rp. 977.977.886.342,87. Rasio ekonomi pemerintah kota Batu tahun 2014 sampai dengan 2018 berada adalah ekonomis karena rasio ekonomi kurang dari 100%.

Kriteria ekonomi dalam pengukuran kinerja keuangan yang diberikan oleh Mahsun (2006) dalam Faridah (2013: 46). Kinerja pemerintah daerah dikatakan ekonomis apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio ekonomi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Perumusan penganggaran yang telah dikemukakan tersebut telah melalui mekanisme yang ada setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran pada BKD dan tidak boleh melebihi dari apa yang direncanakan dalam dokumentasi pelaksanaan anggaran serta menerima usulan rencana anggaran masing-masing bidang untuk dijadikan acuan dalam menetapkan sebuah anggaran sehingga pelaksanaan penganggaran daerah sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintah wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah pilihan berpedoman pada standar belanja dan standar harga satuan regional. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan masing-masing urusan pemerintah tersebut di atas digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD. Dari ketentuan tersebut kepala Sub. Bidang Perencanaan Anggaran, mengemukakan bahwa:

“Bentuk perencanaan pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh BPKAD Kota Batu berdasarkan Renstra, RPJMD, Renja, RKPD, RKA-RDPPA sedangkan prosesnya yaitu penyusunan proposal dan kegiatan, penyusunan RKA-RDPPA dan penyusunan DPA-DPPA”

(Wawancara dengan Zulfaton selaku Staff Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Batu, tanggal 12 Oktober 2019)

Senada dengan hal di atas, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Batu menyatakan bahwa:

“Kegiatan pelaksanaan penganggaran yang dilakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu yaitu dengan menyesuaikan dengan kebutuhan, kemudian menyusun dalam rencana kerja anggaran (RKA) berdasarkan KUA PPAS. Dengan tersusunnya anggaran belanja langsung tentu diharapkan akan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Karena belanja langsung merupakan anggaran yang langsung bersentuhan dengan masyarakat”.

(Wawancara dengan Mochamad Tavip selaku Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Batu, tanggal 12 Oktober 2019)

Dari wawancara di atas diketahui bahwa perencanaan anggaran yang sudah disepakati akan didokumentasikan dalam KUA dan PPAS tahun berjalan. KUA dan PPAS yang telah disepakati Bersama antara kepala daerah dan DPRD, kepala daerah mengeluarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD yang mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai indikator, tolak ukur dan target kinerja dan masing-masing program kegiatan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perencanaan anggaran belanja langsung akan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. Tentunya tidak terlepas dari prioritas dan penghematan kegiatan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah kota Batu.

Pengertian ekonomis sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan demikian pada hakekatnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dan ekonomis, karena kedua-duanya menghendaki penghapusan dan penurunan biaya (*cost reduction*). Terjadinya peningkatan biaya mestinya terkait dengan peningkatan manfaat yang lebih besar.

Rasio ekonomi mengalami penurunan pada tahun 2017 hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan dan 2018 hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan.

4.2.2 Rasio Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan yang serendah-rendahnya (*spending well*). Efisiensi merupakan hal penting dari tiga pokok bahasan *value for money*. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan (realisasi pengeluaran) dengan realisasi pendapatan yang diterima, formulasinya adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Rp.632.737.653.548}}{\text{Rp.703.680.192.404,53}} \times 100\% \\ &= 89,92\% \end{aligned}$$

Perhitungan rasio efisiensi adalah perbandingan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan. rasio efisiensi untuk tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Rasio Efisiensi
Tahun 2014-2018

| Tahun | Realisasi Belanja | Realisasi Pendapatan | Rasio Efisiensi |
|-------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 2014 | 632.737.653.548,00 | 703.680.192.404,53 | 89.92% |
| 2015 | 819.751.076.487,00 | 723.545.986.211,25 | 113.30% |
| 2016 | 780.506.520.832,98 | 803.450.046.047,54 | 97.14% |
| 2017 | 779.141.659.104,85 | 849.443.705.762,26 | 91.72% |
| 2018 | 766.876.197.709,40 | 984.939.247.451,18 | 77.86% |

Sumber data di olah dari laporan keuangan Kota Batu tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa rasio efisiensi untuk tahun 2014 sebesar 89,92%, tahun 2015 sebesar 113,30%, tahun 2016 sebesar 97,14%, tahun 2017 sebesar 91,72% dan 77,86%. Pada tahun 2015 rasio efisiensinya mengalami peningkatan menjadi 113,3%, sedangkan untuk tahun 2016, 2017 dan 2018 cenderung mengalami penurunan nilai rasio efisiensinya. Tahun 2014, 2016, 2017 dan 2018 rasio efisiensinya adalah sangat efisien karena kurang dari 100%, sedangkan untuk tahun 2015 tidak efisien Lebih dari 100%.

Peningkatan rasio efisiensi tahun 2015 sebesar 10,46% dikarenakan karena adanya kenaikan realisasi belanja dari tahun 2014 sebesar Rp. 632.737.653.548,00 tahun 2015 menjadi Rp. 819.751.076.487,00 diikuti oleh peningkatan realisasi pendapatan dari tahun 2014 sebesar Rp. 703.680.192.404,53 tahun 2015 menjadi Rp. 723.545.986.211,25.

Pada tahun 2016 rasio efisiensi mengalami penurunan sebesar 16,16%, peningkatan ini disebabkan oleh penurunan realisasi belanja tahun 2015 Rp. 819.751.076.487,00 tahun 2016 menjadi Rp. 780.506.520.832,98 diikuti

penurunan ralisasi pendapatan tahun 2015 sebesar Rp. 723.545.986.211,25 tahun 2016 menjadi Rp. 803.450.046.047,54.

Pada tahun 2017 rasio efisiensi mengalami penurunan sebesar 7,74%, penurunan ini disebabkan oleh penurunan realisasi belanja tahun 2016 Rp. 780.506.520.832,98 tahun 2016 menjadi Rp. 728.120.377.965,85 diikuti kenaikan realisasi pendapatan tahun 2017 sebesar Rp. 803.450.046.047,54 tahun 2016 menjadi Rp. 849.443.705.762,26.

Pada tahun 2018 rasio efisiensi mengalami penurunan sebesar 4,63%, penurunan ini disebabkan oleh penurunan realisasi belanja tahun 2017 Rp. 728.120.377.965,85 tahun 2018 menjadi Rp. 766.876.197.709,40 diikuti kenaikan realisasi pendapatan tahun 2017 sebesar Rp. 849.443.705.762,26 tahun 2018 menjadi Rp. 984.939.247.451,18. Rasio ekonomi pemerintah kota Batu tahun 2014 sampai dengan 2018 berada adalah ekonomis karena rasio ekonomi kurang dari 100%.

Dari keterangan di atas diperkuat hasil wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Bahwa semua kegiatan yang ada di BPKAD kota Batu dapat diukur kinerjanya baik *output* maupun *outcame* sehingga kinerja suatu kegiatan dapat tercapai. Dengan kinerja anggaran yang baik dapat dikatakan efisien atau menurut perundangan-undangan disebutkan bahwa anggaran dikatakan efisien adalah kurang dari 100%”.

(Wawancara Zulfaton selaku Staff Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Batu, tanggal 12 Oktober 2019)

“Ya.. kalau menurut saya mba.. kinerja pemkot Batu dapat dilihat dari skema anggaran yang ada. Dengan skema anggaran yang terukur dan disertai perimbangan antara biaya langsung dan tidak langsung dapat dikatakan kinerja yang baik. Hal ini menurut saya bahwa semua anggaran di kegiatan dinas pemkot batu pencapaian serapan cukup baik. Kinerja keuangan yang baik dan dikatakan efisien apabila jelas antara perencanaan dan hasil kegiatna. Hasil assessment yang efisien adalah kurang dari 100%. Efisien kan perbandingan terbaik antara input dan output. Misalnya

punya input uang Rp 100, kita harus dapat output yang maksimal. Kalau misalnya punya barang Rp 100 kita harus mengeluarkan seminimal mungkin”.

(Wawancara Mochamad Tavip selaku Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Batu, tanggal 12 Oktober 2019)

Dari hasil wawancara di atas memperjelas efektifitas dan efisiensi penyusunan anggaran serta meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah maupun program dan kegiatan sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan kriteria efisiensi penilaian kinerja keuangan yang diberikan oleh Mahsun (2006) dalam Faridah (2013: 47). Kinerja pemerintah daerah akan semakin efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%.

Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengfisiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Mardiasmo (2013 hal. 112) yang menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu.

Dengan adanya penargetan realisasi pendapatan daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Untuk target pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan untuk tingkat realisasi atas pendapatan daerah cenderung mengalami penurunan, hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio efektivitas atas pendapatan daerah yang mengalami penurunan. Dengan menurunnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan pada Pemerintah Kota Batu.

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan (realisasi pengeluaran) dengan realisasi pendapatan yang diterima, Rasio efisiensi mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018 hal ini dikarenakan realisasi pendapatan lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja kota Batu. Adapun kriteria efisiensi penilaian kinerja keuangan yang diberikan oleh Mahsun (2006) jika kurang dari 100 rasio efisiensinya berarti sangat efisien. Dan realisasi belanja harus lebih kecil dari realisasi pendapatan,

4.2.3 Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan

tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tingkat Efektivitas dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat perbandingan anggaran pendapatan dengan realisasinya dan presentase tingkat pencapaiannya.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas tahun 2014} &= \frac{703.680.192.404,53}{\text{Rp. } 678.600.450.633,00} \times 100\% \\ &= 103,70\% \end{aligned}$$

Perhitungan Rasio efektifitas adalah perbandingan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Rasio efektifitas untuk tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Rasio Efektifitas
Tahun 2014-2018

| Tahun | Realisasi Pendapatan | Anggaran Pendapatan | Rasio Efektifitas |
|-------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 2014 | 703.680.192.404,53 | 678.600.450.633,00 | 103.70% |
| 2015 | 725.754.996.854,34 | 723.545.986.211,25 | 100.31% |
| 2016 | 803.450.046.047,54 | 826.995.638.282,88 | 97.15% |
| 2017 | 849.443.705.762,26 | 859.991.508.077,69 | 98.77% |
| 2018 | 984.939.247.451,18 | 928.000.607.523,32 | 106.14% |

Sumber data di olah dari laporan keuangan Kota Batu tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa rasio efektifitas untuk tahun 2014 sebesar 103,70%, tahun 2015 sebesar 100,31%, tahun 2016 sebesar 97,15%, tahun 2017 sebesar 98,15% dan 106,14%. Tahun 2014, 2015, dan 2018 rasio efektifitasnya adalah efektif karena rasionya lebih dari 100%, sedangkan untuk tahun 2016 dan 2017 tidak efektif karena rasionya kurang dari 100%.

Peningkatan rasio efektifitas tahun 2015 sebesar 3,39% dikarenakan karena adanya peningkatan realisasi pendapatan dari tahun 2014 sebesar

Rp. 703.680.192.404,53 tahun 2015 menjadi Rp. 723.545.986.211,25, diikuti kenaikan anggaran pendapatan dari tahun 2014 sebesar Rp. 678.600.450.633,00 tahun 2015 menjadi Rp. 723.545.986.211,25.

Pada tahun 2016 rasio efektifitas mengalami penurunan sebesar 3,16%, penurunan ini disebabkan oleh peningkatan realisasi pendapatan tahun 2015 sebesar Rp. 725.754.996.854,34 tahun 2016 menjadi Rp. 803.450.046.047,54 diikuti kenaikan anggaran pendapatan dari tahun 2015 sebesar Rp. 723.545.986.211,25 tahun 2016 menjadi Rp. 826.995.638.282,88.

Pada tahun 2017 rasio efektifitas mengalami peningkatan sebesar 1,62%, peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan realisasi belanja tahun 2016 sebesar Rp. 803.450.046.047,54 tahun 2017 menjadi Rp. 849.443.705.762,26 diikuti kenaikan anggaran pendapatan dari tahun 2016 sebesar Rp. 826.995.638.282,88 tahun 2017 menjadi Rp. 859.991.508.077,69

Pada tahun 2018 rasio efektifitas mengalami peningkatan sebesar 1,62%, hal ini disebabkan kenaikan realisasi pendapatan tahun 2017 sebesar Rp. 849.443.705.762,26 tahun 2018 menjadi Rp. 984.939.247.451,18 diikuti kenaikan anggaran pendapatan dari tahun 2016 sebesar Rp. 826.995.638.282,88 tahun 2017 menjadi Rp. 859.991.508.077,69. Rasio ekonomi pemerintah kota Batu tahun 2014 sampai dengan 2018 berada adalah ekonomis karena rasio ekonomi kurang dari 100%.

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan

Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio efektivitas diwujudkan dalam bentuk transparansi pemerintah Kota Batu. Bentuk transparansi tersebut yaitu dengan memuat pada beberapa media lokal maupun nasional serta memuat pada beberapa media online dan juga melalui website BKD terbukti hal ini sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah daerah memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun sesuai standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan berupa laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah. Sehingga dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, diperlukan tahapan- tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, secara sistematis, sinergis dan komprehensif yang mengarah pada pencapaian visi, dan misi Kota Batu sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Hal ini menurut wawancara yang dihasilkan yaitu:

“Rasio efektivitas diwujudkan dengan adanya kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dalam penerapan prinsip pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu yaitu Bersih, Transparan dan Akuntabel”.

(Wawancara Zulfaton selaku Staff Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Batu, tanggal 12 Oktober 2019)

“Sehubungan dengan rasio efektivitas, BKD tentunya selalu membenahi secara administratif melalui analisis dan evaluasi kinerja setiap pelaksanaan program dan kegiatan. tentu ada beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran yaitu Sumber Daya Manusia dan Koordinasi dalam penyusunan anggaran. Dalam pelaksanaan pengelolaan

anggaran tidak terdapat kendala sepanjang disesuaikan dengan kegiatan yang ada, karena telah mengikuti scedul yang sudah ditetapkan mba..”.
(Wawancara Mochamad Tavip selaku Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Batu, tanggal 12 Oktober 2019)

Dari hasil wawancara di atas memperjelas Badan Keuangan Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Restra) berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kota Batu. Serta tetap memperhatikan kebijakan dari Bupati yang disertai kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dari presiden dengan mempertimbangkan Pembangunan Kota Batu tahun 2018-2024, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diarahkan masyarakat yang cerdas, sehat dan sejahtera. Hal tersebut telah menjadi kesepakatan antara seluruh stakeholder yaitu Pemerintah daerah, DPRD, kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak di bidang sosial dan budaya, ekonomi maupun politik dan keamanan..

Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar seratus persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Kriteria efektivitas kinerja keuangan dalam Mahsun (2006) dalam Faridah (2013: 48).

Sebelum laporan pertanggungjawaban setiap pegawai diterima terlebih dahulu dilakukan evaluasi secara administratif atas laporan keuangan yang dibuat demi menghindari kesalahan dalam penulisan laporan keuangan. Sehingga proses pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja yaitu pemahaman terhadap petunjuk

teknis ditingkatkan pemantapan dalam perencanaan dan koordinasi mengoptimalkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, hingga dianggap penyelenggaran urusan perkantoran dan pelayanan masyarakat menjadi tepat sasaran.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pendapatan daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi Untuk target pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan untuk tingkat realisasi atas pendapatan daerah cenderung mengalami penurunan, hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio efektivitas atas pendapatan daerah yang mengalami penurunan. Dengan menurunnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan pada Pemerintah Kota Batu.

Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016 dan 2017 rasio efektifitasnya tidak efektif hal ini dikarenakan realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan sedikit perbedaan.

4.2.4. Rekapitulasi Rasio Keuangan Kota Batu tahun 2014-2018

Ekonomis adalah praktik pembelian dengan tingkat kualitas tertentu dengan harga terbaik yang dimungkinkan (*spendingless*). Adapun kriteria ekonomi dalam pengukuran kinerja keuangan yang diberikan oleh Mahsun (2006) dalam Faridah (2013: 46) dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5
Kriteria Ekonomi

| Rasio Ekonomi | Kriteria Ekonomi |
|-------------------|--------------------|
| Kurang dari 100% | Ekonomis |
| Sama dengan 100 % | Ekonomis Berimbang |
| Lebih dari 100% | Tidak Ekonomis |

Sumber: Mohammad Mahsun, 2006.

Efisiensi merupakan hal penting dari tiga pokok bahasan *value for money*. Adapun kriteria efisiensi penilaian kinerja keuangan yang diberikan oleh Mahsun (2006) dalam Faridah (2013: 47) dapat dilihat pada Tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4.6
Kriteria Efisiensi

| Rasio Efisiensi | Kriteria Efisiensi |
|-------------------|--------------------|
| Lebih dari 100% | Tidak Efisien |
| Sama dengan 100 % | Efisien Berimbang |
| Kurang dari 100% | Sangat Efisien |

Sumber: Mohammad Mahsun, 2006

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Kriteria efektivitas kinerja keuangan dalam Mahsun (2006) dalam Faridah (2013: 48) dapat dilihat pada Tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4.7
Kriteria Efektivitas

| Rasio Efektivitas | Kriteria Efektivitas |
|-------------------|----------------------|
| Kurang dari 100% | Tidak Efektif |
| Sama dengan 100 % | Efektif Berimbang |
| Lebih dari 100% | Efektif |

Sumber: Mohammad Mahsun, 2006.

Tabel 4.3
Rekapitulasi Rasio Keuangan Kota Batu
Tahun 2014-2018

| Tahun | Rasio Ekonomi | Kriteria | Rasio Efisiensi | Kriteria | Rasio Efektivitas | Kriteria |
|-------|---------------|----------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 2014 | 79.87% | Ekonomis | 89.92% | Efisien | 103.70% | Efektif |
| 2015 | 90.43% | Ekonomis | 113.30% | Tidak Efisien | 100.31% | Efektif |
| 2016 | 90.78% | Ekonomis | 97.14% | Efisien | 97.15% | Tidak Efektif |
| 2017 | 83.04% | Ekonomis | 91.72% | Efisien | 98.77% | Tidak Efektif |
| 2018 | 78.41% | Ekonomis | 77.86% | Efisien | 106.14% | Efektif |

Sumber data di olah dari laporan keuangan Kota Batu tahun 2019

4.3 Pembahasan

4.3.1 Rasio Ekonomi

Berdasarkan analisis data, dapat diketahui bahwa dari sisi ekonomi seluruh kegiatan Dinas Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Kota Batu pada tahun 2014 sampai dengan 2016 mencapai nilai ekonomis. Rasio ekonomi untuk tahun 2014 sebesar 79,87%, tahun 2015 sebesar 90,43%, tahun 2016 sebesar 90,78%, tahun 2017 sebesar 83,04% dan 78.41%. Rasio ekonomi tahun 2014-2018 mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan 2016, hal ini disebabkan karena kenaikan realisasi pengeluaran dan anggaran pengeluaran. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 cenderung mengalami penurunan dikarenakan realisasi pengeluaran mengalami penurunan. Pengeluaran yang dimaksud dalam rumus tersebut adalah total belanja.

Rasio ekonomi pemerintah kota Batu tahun 2014 sampai dengan 2018 berada adalah ekonomis karena rasio ekonomi kurang dari 100%, hasil ini

berdasarkan kriteria ekonomi dalam pengukuran kinerja keuangan yang diberikan oleh Mahsun (2006) dalam Faridah (2013: 46). Kinerja pemerintah daerah dikatakan ekonomis apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio ekonomi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan demikian pada hakekatnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dan ekonomis, efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum.

Efisiensi sebagai anggapan bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian-penilaian relatif, membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima. Sedangkan efektivitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Terjadinya peningkatan biaya mestinya terkait dengan peningkatan manfaat yang lebih besar. Artinya, pada Dinas Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Kota Batu belum sepenuhnya mampu mengelola keuangan dengan baik. Hasil penelitian tersebut cenderung mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferina (2017), Gare (2017), Indiaswari (2017), Sari (2018) dan Zain (2018).

4.3.2 Rasio Efisiensi

Berdasarkan analisis data, dapat diketahui bahwa dari sisi efisiensi seluruh kegiatan Dinas Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Kota Batu pada tahun 2014 sampai dengan 2016 mencapai nilai rasio sangat efisien. Rasio efisiensi

untuk tahun 2014 sebesar 89,92%, tahun 2015 sebesar 113,30%, tahun 2016 sebesar 97,14%, tahun 2017 sebesar 91,72% dan 77,86%. Pada tahun 2015 rasio efisiensinya mengalami peningkatan menjadi 113,3%, sedangkan untuk tahun 2016, 2017 dan 2018 cenderung mengalami penurunan nilai rasio efisiensinya. Tahun 2014, 2016, 2017 dan 2018 rasio efisiensinya adalah sangat efisien karena kurang dari 100%, sedangkan untuk tahun 2015 tidak efisien Lebih dari 100%.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan yang serendah-rendahnya (*spending well*) maksudnya adalah bahwa total belanja diminimalkan harus disesuaikan dengan pendapatan yang . Hasil penelitian tersebut secara empiris mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferina (2017), Gare (2017), Indiaswari (2017), Sari (2018) dan Zain (2018) yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang belum optimal sehingga menyebabkan anggaran belanja untuk kegiatan menjadi tidak produktif atau tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan.

4.3.3 Rasio Efektifitas

Berdasarkan analisis data, dapat diketahui bahwa dari sisi efektifitas seluruh kegiatan Dinas Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Kota Batu pada tahun 2014 sampai dengan 2016. Rasio Efektifitas untuk tahun 2014 sebesar 103,70%, tahun 2015 sebesar 100,31%, tahun 2016 sebesar 97,15%, tahun 2017 sebesar 98,15% dan 106,14%.

Tahun 2014, 2015, dan 2018 rasio efektifitasnya adalah efektif karena rasionya lebih dari 100%, sedangkan untuk tahun 2016 dan 2017 tidak efektif karena rasionya kurang dari 100%. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar seratus persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Kriteria efektivitas kinerja keuangan dalam Mahsun (2006) dalam Faridah (2013: 48).

Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian tersebut cenderung mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferina (2017), Gare (2017), Indiaswari (2017), Sari (2018) dan Zain (2018) yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang belum optimal sehingga menyebabkan anggaran belanja untuk kegiatan menjadi tidak produktif atau tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan pemerintah dilaporkan dengan tepat waktu dan disusun mengikuti standar pemerintah yang secara rasional telah diterima, sehingga setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat mengisyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN atau APBD.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dengan metode *value for money* terhadap penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Rasio ekonomi untuk tahun 2014 sebesar 79,87%, tahun 2015 sebesar 90,43%, tahun 2016 sebesar 90,78%, tahun 2017 sebesar 83,04% dan 78,41%. Rasio ekonomi tahun 2014-2018 mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan 2016 sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 cenderung mengalami penurunan. Rasio ekonomi pemerintah kota Batu tahun 2014 sampai dengan 2018 kurang dari 100%, maka artinya adalah ekonomis. Hal ini Pemerintah Kota Batu mampu dalam mengendalikan biaya-biaya yang di keluarkan, karena jumlah yang di keluarkan tidak jauh lebih besar pada realisasinya dari pada yang telah di anggarkan.
2. Rasio efisien untuk tahun 2014 sebesar 89,92%, tahun 2015 sebesar 113,30%, tahun 2016 sebesar 97,14%, tahun 2017 sebesar 91,72% dan 77,86%. Pada tahun 2015 rasio efisiensinya mengalami peningkatan menjadi 113,3%, sedangkan untuk tahun 2016, 2017 dan 2018 cenderung mengalami penurunan nilai rasio efisiensinya. Tahun 2014, 2016, 2017 dan 2018 kurang dari 100% artinya sangat efisien, sedangkan untuk tahun 2015 Lebih dari 100% artinya tidak efisien. Hal ini Pemerintah Kota Batu pada tahun 2015 mengalami peningkatan biaya yang keluarkan melebihi batas anggaran.

3. Rasio Efektifitas untuk tahun 2014 sebesar 103,70%, tahun 2015 sebesar 100,31%, tahun 2016 sebesar 97,15%, tahun 2017 sebesar 98,15% dan 106,14%. Tahun 2014, 2015, dan 2018 rasionya lebih dari 100% artinya adalah efektif, hal ini pemerintah mampu mengelola sumber daya keuangan daerah dengan baik dan sukses dalam menentukan target penerimaan daerah. Sedangkan tahun 2016 dan 2017 rasionya kurang dari 100% artinya tidak efektifitas, hal ini dikarenakan pemerintah tidak dapat memenuhi target penerimaan daerah.

5.2 Saran

1. Bagi Dinas Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Kota Batu membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan dengan baik agar dapat menghasilkan kegiatan yang efisien. Membuat pelaksanaan kegiatan dengan tepat agar kegiatan yang direncanakan dapat tercapai sehingga dampak yang ditimbulkan menjadi terlihat.
2. Bagi peneliti diharapkan untuk Kinerja Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan dapat menjaga kestabilan Anggaran Pengeluaran.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A.Anwar Prabu Mangkunegara. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Afiati, Tri Astuti. 2011. *Analisis Value For Money pada Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Semarang*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang,
- Ahmad S Ruky. 2002. *Sistem Manajemen Kinerja*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Alwi, hasan. 2000. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Yang Disempurnakan*. Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Deddi Nordiawan 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Faridah, Y. 213,September 28. *Pengukuran kinerja Pengolahan Keuangan Daerah dengan Pendekatan Value, For money Pada Pemerintah Kabuptaen Gresik*. Di petik Aproil 22.2018 dari etheses Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim malang : Http : // etheses.UIN Malang.as . Id/2021/6 09520073 bab 2 pdf
- Ferina 2017 Dengan Judul *Penilaian Kinerja Dengan Menerapkan Indikator Value For Money Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin*
- Ferina dan Tjandrakirana. 2015. ”*Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan*”. Jurnal Akuntanika. Vol. 2. No. 1. Gare, Melchior Eugenndori. 2017. Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan *Value For Money* Pada Klinik Adiwarga Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Jurusan akuntansi Universitas Sanata Dharma, Vol. 01. No. 03
- Gare, Melchior Eugenndori. 2017. Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan *Value For Money* Pada Klinik Adiwarga Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Jurusan akuntansi Universitas Sanata Dharma, Vol. 01. No. 03
- Hariyanto, Agus. 2009. *Membuat Anak Cepat Pintar Membaca*. Jogjakarta: Diva Press.

Indarti, Sri, Hendriani, Susi, Mahda, Mutia. 2014. *Pengaruh Faktor Kepribadian Pegawai dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Regional XII Pekanbaru*. Fakultas Ekonomi Kampus Bina Baswidya, Vol. 22. No 1

Indriaswari, Laurensia Koen. 2017. *Analisis Value for Money Dalam Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kebutuhan Kabupaten Bayumas*.

judul Analisis Value for Money Dalam Pengukuran Kinerja
judul Analisis Value for Money Dalam Pengukuran Kinerja

Khikmah, Alayyah 2014 “ Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah kabupaten Lamongan berdasarkan konsep Value For Money.” Jurnal Akuntansi for Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) . Akuntabilitas dan Good Govenance. Jakarta: LAN dan BPKP. 2000.

Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. *Akuntabilitas dan Good Governance : Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Modul 1 sampai 5. Jakarta LAN dan BPKP. 2000.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI: Yogyakarta. money.” Jurnal Akuntansi UNESA hal 13-14

Mahmudi, 2013, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi IlmuManajemen YKPN, Yogyakarta.

Mahsun. 2013. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. 2007. (Online), ([http:// hukum.unsrat.ac.id/](http://hukum.unsrat.ac.id/)), diakses 25 Juli 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2011. (Online), [http:// kemendagri.go.id/](http://kemendagri.go.id/), diakses 26 Juli 2016

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 *Berkaitan Dengan Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2005. (Online), <http://djpk.kemenkeu.go.id/>, diakses 05 Juni 2016.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 38 Tahun 2018 *Tentang Penggunaan Anggaran*

Poister, Theodore H. 2005. *Measuring Performance In Public and Nonprofit Organization*. United States of America: Jossey-Bass.

Rukky, Ahmad. S. 2002 *Sistem Manajemen Kinerja*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Jakarta: Graha Ilmu.

Sugiono. 2011. *Metodelogi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta:

Zain, Wardiman. 2018. Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan *Value For Money Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng*. Fakultas Ekonomi Kabupaten Makkasar.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 1 WAWANCARA

Narasumber : Bapak Muhammad Tavid
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan Kota Batu
Waktu Wawancara : 12 Oktober jam 09:15

R: Assalamu'alaikum wr wb. Selamat pagi pak.. saya Risa dari mahasiswa UIN malang, saya mau bertanya tentang pengukuran kinerja pemerintah daerah menggunakan prinsip value for money, apakah bapak bersedia?

MT: Wa'alaikum salam.. Siapp. Bersedia mba..

R: Dalam pengukuran kinerja terdapat tiga rasio pak.. ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Rasio ekonomi adalah kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. Yang saya tanyakan adalah bagaimana hal ini diterapkan dalam anggaran di pemerintah kota Batu pak?

MT: jadi prinsip tersebut kita lakukan. Penerapan anggaran pemerintah kota Batu didasarkan pada APBD diwujudkan dalam semua kegiatan OPD baik biaya langsung maupun tidak langsung. Dari situlah pemerintah kota Batu secara cermat dan hati-hati dalam menyerap anggaran. Harapan masyarakat Batu agar transparansi anggaran dapat kami wujudkan.

R: Bagaimana perumusan anggaran pemerintah Kota Batu?

MT: Kegiatan pelaksanaan penganggaran yang dilakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu yaitu dengan menyesuaikan dengan kebutuhan, kemudian menyusun dalam rencana kerja anggaran (RKA) berdasarkan KUA PPAS. Dengan tersusunnya anggaran belanja langsung tentu diharapkan akan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Karena belanja langsung merupakan anggaran yang langsung bersentuhan dengan masyarakat".

R: Bagaimana sebuah kinerja anggaran dikatakan efisien pak?

MT: Ya.. kalau menurut saya mba.. kinerja pemkot Batu dapat dilihat dari skema anggaran yang ada. Dengan skema anggaran yang terukur dan disertai perimbangan antara biaya langsung dan tidak langsung dapat dikatakan kinerja

yang baik. Hal ini menurut saya bahwa semua anggaran di kegiatan dinas pemkot batu pencapaian serapan cukup baik. Kinerja keuangan yang baik dan dikatakan efisien apabila jelas antara perencanaan dan hasil kegiatan. Hasil assessment yang efisien adalah kurang dari 100%. Efisien kan perbandingan terbaik antara input dan output. Misalnya punya input uang Rp 100, kita harus dapat output yang maksimal. Kalau misalnya punya barang Rp 100 kita harus mengeluarkan seminimal mungkin”.

R: Kemudian bagaimana sebuah kinerja anggaran dikatakan efektif pak?

MT: Sehubungan dengan rasio efektivitas, BKD tentunya selalu membenahi secara administratif melalui analisis dan evaluasi kinerja setiap pelaksanaan program dan kegiatan. tentu ada beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran yaitu Sumber Daya Manusia dan Koordinasi dalam penyusunan anggaran. Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran tidak terdapat kendala sepanjang disesuaikan dengan kegiatan yang ada, karena telah mengikuti scedul yang sudah ditetapkan mba..”.

Nara sumber : Bapak Zulfaton
Bagian : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Batu
Waktu Wawancara : 12 Oktober 2019 jam 10:30

R: Assalamu'alaikum wr wb. Selamat pagi pak.. saya Risa dari mahasiswa UIN malang, saya mau bertanya tentang pengukuran kinerja pemerintah daerah menggunakan prinsip value for money, apakah bapak bersedia?

Z: Wa'alaikum salam wr wb. Iyaa. silahkan

R: Dalam pengukuran kinerja terdapat tiga rasio pak.. ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Rasio ekonomi adalah kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. Yang saya tanyakan adalah bagaimana hal ini diterapkan dalam anggaran di pemerintah kota Batu pak?

Z: Yang saya ketahui bahwa secara makro anggaran pemerintah Batu terdapat tiga input yaitu dari Musren, OPD dan DPRD. Ketiga input tadi didokumentasikan dan disusun dalam RAPBD kemudian ditetapkan oleh DPRD dalam bentuk Perda. APBD tersebutlah yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah kota Batu dalam menerapkan anggaran diwujudkan bentuk kegiatan semua OPD

R: Bagaimana perumusan anggaran pemerintah Kota Batu?

Z: Bentuk perencanaan pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh BPKAD Kota Batu berdasarkan Renstra, RPJMD, Renja, RKPD, RKA-RDPPA sedangkan prosesnya yaitu penyusunan proposal dan kegiatan, penyusunan RKA-RDPPA dan penyusunan DPA-DPPA”

R: Bagaimana sebuah kinerja anggaran dikatakan efisien pak?

Z: Bahwa semua kegiatan yang ada di BPKAD kota Batu dapat diukur kinerjanya baik *output* maupun *outcome* sehingga kinerja suatu kegiatan dapat tercapai. Dengan kinerja anggaran yang baik dapat dikatakan efisien atau menurut

perundangan-undangan disebutkan bahwa anggaran dikatakan efisien adalah kurang dari 100%”.

R: Kemudian bagaimana sebuah kinerja anggaran dikatakan efektif pak?

Z; Rasio efektivitas diwujudkan dengan adanya kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dalam penerapan prinsip prtanggungjawaban pengelolaan anggaran Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu yaitu Bersih, Transparan dan Akuntabel”.





LAMPIRAN 2
LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan tahun 2014

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU

dan

WALIKOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 berupa Laporan Keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

| | |
|--|-----------------------------|
| a. Pendapatan | Rp703.680.192.404,53 |
| b. Belanja | (Rp 632.737.653.584,00) |
| Surplus | <u>Rp 70.942.538.820,53</u> |
| c. Pembiayaan | |
| - Penerimaan | Rp114.971.695.680,37 |
| - Pengeluaran | (Rp 425.928.800,00) |
| Pembiayaan Netto | <u>Rp114.545.766.880,37</u> |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | Rp185.488.305.700,90 |

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp25.079.741.771,53 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan | Rp678.600.450.633,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp703.680.192.404,53</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | <u>(Rp 25.079.741.771,53)</u> |
- (2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp159.448.563.929,37 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah Perubahan | Rp792.186.217.513,37 |
| b. Realisasi | <u>Rp632.737.653.584,00</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | <u>Rp159.448.563.929,37</u> |
- (3) Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp184.528.305.700,90 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah Perubahan | (Rp113.585.766.880,37) |
| b. Realisasi | <u>Rp 70.942.538.820,53</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | <u>(Rp184.528.305.700,90)</u> |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp40.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp115.011.695.680,37 |
| b. Realisasi | <u>Rp114.971.695.680,37</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | <u>Rp 40.000.000,00</u> |

Laporan keuangan tahun 2015

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp2.209.010.653,09 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp723.545.986.211,25
 - b. Realisasi Rp725.754.996.854,34
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp 2.209.010.643,09
- (2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp86.783.215.425,15 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp906.534.291.912,15
 - b. Realisasi Rp819.751.076.487,00
 - Selisih Lebih/(Kurang) (Rp 86.783.215.425,15)
- (3) Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp88.992.226.068,24 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surplus/defisit setelah Perubahan (Rp182.988.305.700,90)
 - b. Realisasi (Rp 93.996.079.632,66)
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp 88.992.226.068,24
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp185.488.305.700,90
 - b. Realisasi Rp185.488.305.700,90
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp 0,00
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp2.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp2.500.000.000,00
 - b. Realisasi Rp 0,00
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp2.500.000.000,00
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp2.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp182.988.305.700,90
 - b. Realisasi Rp185.488.305.700,90
 - Selisih Lebih/(Kurang) (Rp 2.500.000.000,00)

Laporan keuangan tahun 2016

|  LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KOTA BATU Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015 dalam Rupiah | | | | | |
|---|-----------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
| URAIAN | Ref | ANGGARAN 2016 | REALISASI 2016 | (%) | REALISASI 2015 |
| PENDAPATAN - LRA | 5.1.1 | 826.995.638.282,88 | 803.450.046.047,54 | 97,15 | 725.754.996.854,34 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA | 5.1.1.a | 117.751.331.260,21 | 109.533.498.033,54 | 93,02 | 104.233.584.925,34 |
| Pendapatan Pajak Daerah - LRA | 5.1.1.a.1 | 94.100.000.000,00 | 88.757.189.919,00 | 94,32 | 83.692.699.994,00 |
| Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | 5.1.1.a.2 | 7.315.388.400,00 | 5.855.560.775,00 | 80,04 | 5.209.867.148,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA | 5.1.1.a.3 | 2.152.462.133,00 | 2.152.462.133,00 | 100,00 | 2.177.429.333,26 |
| Lain-lain PAD yang Sah - LRA | 5.1.1.a.4 | 14.183.480.727,21 | 12.768.085.206,54 | 90,02 | 13.153.588.510,08 |
| PENDAPATAN TRANSFER - LRA | 5.1.1.b | 709.244.307.022,67 | 693.263.750.014,00 | 97,75 | 621.521.411.929,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA | 5.1.1.b.1 | 636.897.400.000,00 | 624.840.719.033,00 | 98,11 | 503.746.629.211,00 |
| Bagi Hasil Pajak - LRA | | 31.015.373.000,00 | 32.435.023.935,00 | 104,58 | 13.596.894.547,00 |
| Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam - LRA | | 26.835.568.000,00 | 18.882.063.346,00 | 70,36 | 35.615.656.664,00 |
| Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA | | 480.460.016.000,00 | 480.460.016.000,00 | 100,00 | 413.219.691.000,00 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.793.240.000,00 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan P3K2 - LRA | | 0,00 | 17.207.864.000,00 | 77,65 | 0,00 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA | | 22.159.816.000,00 | 44.101.166.752,00 | 100,00 | 0,00 |
| Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (IPD) - LRA | | 44.101.167.000,00 | 44.101.166.752,00 | 100,00 | 0,00 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA | | 32.325.460.000,00 | 31.754.585.000,00 | 98,23 | 0,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA | 5.1.1.b.2 | 14.572.714.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.659.864.000,00 |
| Dana Penyesuaian - LRA | | 14.572.714.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.659.864.000,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA | 5.1.1.b.3 | 55.963.173.022,67 | 66.842.910.981,00 | 119,44 | 53.169.725.718,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA | | 55.963.173.022,67 | 66.842.910.981,00 | 119,44 | 53.169.725.718,00 |
| Bantuan Keuangan - LRA | 5.1.1.b.4 | 1.811.020.000,00 | 1.580.120.000,00 | 87,25 | 1.945.193.000,00 |
| Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA | | 1.811.020.000,00 | 1.580.120.000,00 | 87,25 | 1.945.193.000,00 |
| Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA | | 0,00 | 652.798.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Lainnya - LRA | 5.1.1.c | 0,00 | 652.798.000,00 | 0,00 | 797.294.924.728,00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA | 5.1.1.d | 859.790.122.051,82 | 780.506.520.832,98 | 90,78 | 514.622.085.866,00 |
| ELANJA | 5.1.2 | 649.196.998.456,06 | 605.010.937.005,98 | 93,19 | 279.791.171.091,00 |
| BELANJA OPERASI | 5.1.2.a | 323.221.952.453,94 | 308.088.979.621,00 | 95,32 | 147.571.270.561,00 |
| Belanja Pegawai | 5.1.2.a.1 | 239.134.104.002,12 | 198.828.565.414,98 | 83,15 | 72.101.770.068,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 5.1.2.a.2 | 76.909.451.400,00 | 90.188.121.331,00 | 117,27 | 15.157.874.146,00 |
| Belanja Hibah | 5.1.2.a.3 | 9.931.490.600,00 | 7.905.270.639,00 | 79,60 | 281.882.302.047,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 5.1.2.a.4 | 209.342.923.595,76 | 174.368.708.327,00 | 83,29 | 6.437.070.000,00 |
| BELANJA MODAL | 5.1.2.b | 2.076.500.000,00 | 1.908.720.000,00 | 91,92 | 21.941.586.044,00 |
| Belanja Modal Tanah | | 69.739.848.467,76 | 54.627.097.555,00 | 78,33 | 186.782.755.336,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | 62.090.898.011,00 | 47.452.603.915,00 | 76,42 | 64.285.639.225,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | 73.251.311.117,00 | 68.385.857.557,00 | 93,36 | 2.435.251.442,00 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | | 978.461.000,00 | 887.597.400,00 | 90,71 | 0,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | 1.205.905.000,00 | 1.106.831.900,00 | 91,78 | 0,00 |
| Belanja Modal Aset Lainnya | | 1.250.200.000,00 | 1.126.875.500,00 | 90,14 | 790.536.815,00 |
| BELANJA TAK TERDUGA | 5.1.2.c | 1.250.200.000,00 | 1.126.875.500,00 | 90,14 | 790.536.815,00 |
| Belanja Tak Terduga | 5.1.2.d | 55.697.742.299,30 | 39.180.028.293,00 | 70,34 | 22.456.151.759,00 |
| TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN | 5.1.2.d.1 | 8.156.890.439,10 | 8.156.890.439,00 | 100,00 | 0,00 |
| Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | | 7.500.000.000,00 | 7.500.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | | 656.890.439,10 | 656.890.439,00 | 100,00 | 0,00 |
| TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 5.1.2.d.2 | 47.540.851.860,20 | 31.023.137.854,00 | 65,26 | 22.456.151.759,00 |
| Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | | 46.861.065.660,20 | 30.343.351.654,00 | 64,75 | 21.776.365.559,00 |
| Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | | 679.786.200,00 | 679.786.200,00 | 100,00 | 679.786.200,00 |
| PLUS / (DEFISIT) | 5.1.3 | (88.492.226.068,24) | (16.236.503.078,44) | 18,35 | (93.996.079.632,66) |
| BIAYAAN | 5.1.3.a | 91.492.226.068,24 | 91.492.226.068,24 | 100,00 | 185.488.305.700,90 |
| NERIMAAN PEMBIAYAAN | 5.1.3.b | 91.492.226.068,24 | 91.492.226.068,24 | 100,00 | 185.488.305.700,90 |
| Penerimaan Silpa | | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| NGELUARAN PEMBIAYAAN | 5.1.4 | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Penerimaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | | 88.492.226.068,24 | 88.492.226.068,24 | 100,00 | 185.488.305.700,90 |
| BIAYAAN NETTO | | 0,00 | 72.255.722.989,80 | 0,00 | 91.492.226.068,24 |
| EBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | | 0,00 | 72.255.722.989,80 | 0,00 | 91.492.226.068,24 |

Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Laporan keuangan tahun 2017

PEMERINTAH KOTA BATU LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017

| URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | LEBIH / (KURANG) |
|---|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| PENDAPATAN | 859.991.508,077,69 | 0,00 | 849.443.705,762,26 | 849.443.705,762,26 | (10.547.802,315,43) |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 145.865.571.206,69 | 0,00 | 149.423.863.144,26 | 149.423.863.144,26 | 3.558.291.937,57 |
| DANA PERIMBANGAN | 623.287.894,000,00 | 0,00 | 589.620.610.974,00 | 589.620.610.974,00 | (33.667.283.026,00) |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 90.838.042.871,00 | 0,00 | 110.399.231.644,00 | 110.399.231.644,00 | 19.561.188.773,00 |
| BELANJA | 928.207.231.067,49 | 0,00 | 779.141.659.104,85 | 779.141.659.104,85 | (149.065.571.962,64) |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 432.488.127.325,49 | 0,00 | 394.495.440.050,00 | 394.495.440.050,00 | (37.992.687.275,49) |
| BELANJA LANGSUNG | 495.719.103.742,00 | 0,00 | 384.646.219.054,85 | 384.646.219.054,85 | (111.072.884.687,15) |
| SURPLUS / DEFISIT | (68.215.722.989,80) | 0,00 | 70.302.046.657,41 | 70.302.046.657,41 | 138.517.769.647,21 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 72.255.722.989,80 | 0,00 | 72.308.701.558,07 | 72.308.701.558,07 | 52.978.568,27 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 4.040.000.000,00 | 0,00 | 4.040.000.000,00 | 4.040.000.000,00 | 0,00 |
| PEMBIAYAAN NETTO | 68.215.722.989,80 | 0,00 | 68.268.701.558,07 | 68.268.701.558,07 | 52.978.568,27 |
| SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN | 0,00 | 0,00 | 138.570.748.215,48 | 138.570.748.215,48 | 138.570.748.215,48 |

Laporan keuangan tahun 2018

Lampiran I Peraturan Daerah Kota Batu
 Nomor : Tahun 2019
 Tanggal : 2019



PEMERINTAH KOTA BATU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2017

dalam Rupiah

| URAIAN | ANGGARAN 2018 | REALISASI 2018 | (%) | REALISASI 2017 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| PENDAPATAN - LRA | 928.000.607.523,39 | 984.939.247.451,18 | 106,14 | 849.443.705.762,26 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA | 143.848.169.491,50 | 162.574.646.582,18 | 113,02 | 149.423.863.144,26 |
| Pendapatan Pajak Daerah - LRA | 114.000.000.000,00 | 141.909.362.683,00 | 124,48 | 113.854.910.066,00 |
| Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | 9.398.547.725,00 | 4.609.203.050,00 | 49,04 | 4.899.198.825,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA | 3.873.777.837,55 | 2.430.675.957,10 | 62,75 | 2.360.797.996,69 |
| Lain-lain PAD Yang Sah - LRA | 16.575.843.928,95 | 13.625.404.892,08 | 82,20 | 28.308.956.256,57 |
| PENDAPATAN TRANSFER - LRA | 769.559.204.882,36 | 807.810.760.869,00 | 104,97 | 700.019.842.618,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA | 624.332.263.375,36 | 649.243.671.787,00 | 103,99 | 589.620.610.974,00 |
| Bagi Hasil Pajak - LRA | 33.915.755.000,00 | 29.009.631.679,00 | 85,53 | 26.856.622.417,00 |
| Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA | 38.582.513.000,00 | 67.514.043.095,00 | 174,99 | 16.589.173.725,00 |
| Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA | 474.881.106.000,00 | 474.881.106.000,00 | 100,00 | 474.779.517.000,00 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA | 22.166.515.504,00 | 16.030.781.500,00 | 72,32 | 15.944.561.700,00 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA | 49.206.552.871,00 | 49.661.375.163,00 | 100,92 | 41.123.424.132,00 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan - LRA | 5.579.821.000,36 | 12.146.734.350,00 | 217,69 | 14.327.312.000,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA | 76.097.494.000,00 | 76.097.494.000,00 | 100,00 | 26.352.611.000,00 |
| Dana Penyesuaian - LRA | 76.097.494.000,00 | 76.097.494.000,00 | 100,00 | 26.352.611.000,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA | 67.498.847.507,00 | 80.838.995.082,00 | 119,76 | 83.033.220.644,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA | 67.498.847.507,00 | 80.838.995.082,00 | 119,76 | 83.033.220.644,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bantuan Keuangan - LRA | 1.630.600.000,00 | 1.630.600.000,00 | 100,00 | 1.013.400.000,00 |
| Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA | 1.630.600.000,00 | 1.630.600.000,00 | 100,00 | 1.013.400.000,00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA | 14.593.233.149,53 | 14.553.840.000,00 | 99,73 | 0,00 |
| Pendapatan Hibah - LRA | 14.593.233.149,53 | 14.553.840.000,00 | 99,73 | 0,00 |
| BELANJA | 977.997.886.342,87 | 766.876.197.709,40 | 78,41 | 728.120.377.965,85 |
| BELANJA OPERASI | 806.549.789.067,14 | 641.241.128.741,52 | 79,50 | 584.716.175.525,85 |
| Belanja Pegawai | 372.700.017.825,66 | 317.589.813.170,00 | 85,21 | 290.232.303.415,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 305.952.942.044,15 | 240.160.490.752,52 | 78,50 | 206.827.312.664,85 |
| Belanja Hibah | 82.079.934.882,33 | 68.727.094.191,00 | 83,73 | 77.758.411.850,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 45.816.894.315,00 | 14.763.730.628,00 | 32,22 | 9.898.147.596,00 |
| BELANJA MODAL | 169.619.437.275,73 | 125.401.338.967,88 | 73,93 | 142.582.638.440,00 |
| Belanja Modal Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 59.094.607.135,56 | 46.346.327.318,00 | 78,43 | 59.630.021.824,00 |

| URAIAN | ANGGARAN 2018 | REALISASI 2018 | (%) | REALISASI 2017 |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 31.944.460.864,69 | 17.964.194.930,88 | 56,24 | 44.634.635.614,00 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 74.823.232.541,08 | 57.845.051.514,00 | 77,31 | 36.142.669.300,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3.074.421.864,40 | 2.817.559.100,00 | 91,65 | 479.589.000,00 |
| Belanja Modal Aset Lainnya | 682.714.870,00 | 428.206.105,00 | 62,72 | 1.695.722.702,00 |
| BELANJA TAK TERDUGA | 1.828.660.000,00 | 233.730.000,00 | 12,78 | 821.564.000,00 |
| Belanja Tak Terduga | 1.828.660.000,00 | 233.730.000,00 | 12,78 | 821.564.000,00 |
| TRANSFER | 88.552.787.370,00 | 84.850.839.883,00 | 95,82 | 51.021.281.139,00 |
| TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN | 12.339.854.770,00 | 9.137.919.683,00 | 74,05 | 8.556.890.340,00 |
| Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | 11.400.000.000,00 | 8.787.500.000,00 | 77,08 | 8.000.000.000,00 |
| Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah | 939.854.770,00 | 350.419.683,00 | 37,28 | 656.890.340,00 |
| Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 76.212.932.600,00 | 75.712.920.200,00 | 99,34 | 42.364.390.799,00 |
| Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 53.685.652.400,00 | 53.685.652.400,00 | 100,00 | 22.832.005.999,00 |
| Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 679.786.200,00 | 679.773.800,00 | 99,99 | 679.773.800,00 |
| Transfer Dana Otonomi Khusus | 21.347.494.000,00 | 21.347.494.000,00 | 100,00 | 18.852.611.000,00 |
| SURPLUS / (DEFISIT) | -138.550.066.189,48 | 133.212.209.858,78 | -95,15 | 70.302.046.657,41 |
| PEMBIAYAAN | 138.570.748.215,48 | 138.569.682.613,48 | 100,00 | 72.308.701.558,07 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 138.570.748.215,48 | 138.569.682.613,48 | 99,99 | 72.308.701.558,07 |
| Penggunaan SiLPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pembayaran Pokok Hutang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEMBIAYAAN NETTO | 138.570.748.215,48 | 138.569.682.613,48 | 99,99 | 72.308.701.558,07 |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) | 0,00 | 271.761.210.446,26 | 0,00 | 138.570.748.215,48 |

WALIKOTA BATU

DEWANTI RUMPOKO



LAMPIRAN 3
DOKUMEN PENDUKUNG

Foto bersama bapak zulfaton selaku kasubag administrasi ekonomi dan pembangunan



Foto bersama buk rus selaku anggota bagian administrasi ekonomi dan pembangunan



The logo is a shield-shaped emblem with a light green background and a white border. It features the text "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM" in a light green, sans-serif font along the top and sides. In the center, there is a yellow calligraphic emblem. At the bottom, the text "PUSAT PERPUSTAKAAN" is written in a light green, sans-serif font.

LAMPIRAN 4
DAFTAR KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Risa Wilian Wildani

NIM/Jurusan : 15520027/Akuntansi

Pembimbing : Nawirah, SE., MSA., Ak.

Judul Skripsi : Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money Pada Dinas Administrasi Ekonomi Dan Pembangunan Kota Batu

| No. | Tanggal | Materi Konsultasi | Tanda Tangan Pembimbing |
|-----|-------------------|------------------------|---|
| 1 | 2 Desember 2018 | Pengajuan outline |  |
| 2 | 7 Februari 2019 | Proposal |  |
| 3 | 21 Maret 2019 | Revisi & Acc Proposal |  |
| 4 | 11 Juli 2019 | Seminar Proposal |  |
| 5 | 18 Juli 2019 | Acc Proposal |  |
| 6 | 15 Agustus 2019 | Bab I-V |  |
| 7 | 22 oktober 2019 | Revisi dan Acc Skripsi |  |
| 8 | 25 September 2019 | Acc keseluruhan |  |

Malang, 25 November 2019

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi,



Dr. Hj. Nani Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP : 19720322 200801 2 005



LAMPIRAN 5
BIODATA PENELITI

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Risa Wilian Wildani
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 01 September 1997
Alamat : Jalan Imam Sujono RT 06 RW 04 Bulukerto
Bumiaji Kota Batu
Telephone/Hp : 082-230-119-584
E-mail : risamintuk@gmail.com

Pendidikan Formal

2001 – 2003 : TK Mardisiwi 02
2003 – 2009 : SDN Puntan 02
2009 – 2012 : SMP Islam 01 Kota Batu
2012 – 2015 : MAN 02 Batu
2015 – 2019 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Negeri Malang

Pendidikan Non Formal

2015 – 2016 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta workshop Penulisan Skripsi Integrasi Sains dan Islam diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Pelatihan Menyusun Laporan Keuangan Syariah Menggunakan Excel yang Diselenggarakan oleh HMJ Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

- Peserta Workshop Penulisan Artikel Berbasis OJS (*Open Jurnal System*) dan Islam Oleh Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Pelatihan MYOB yang Diselenggarakan oleh Laboratorium Akuntansi dan Pajak Tahun 2018
- Peserta Sosialisasi Manasik Haji Untuk Mahasiswa/Mahasiswi yang Diselenggarakan oleh Pusat Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang





LAMPIRAN 6
SURAT PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZURAIDAH, SE.,MSA
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

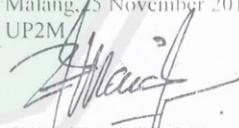
Nama : Risa Wilian Wildani
NIM : 15520027
Handphone : 082230119584
Konsentrasi : akuntansi Sektor Publik
Email : risamintuk@gmail.com
Judul Skripsi : Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money Pada Dinas Administrasi Ekonomi Dan Pembangunan Kota Batu

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

| SIMILARTY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATION | STUDENT PAPER |
|-----------------|------------------|-------------|---------------|
| 24% | 22% | 2% | 15% |

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 November 2019
UP2M


ZURAIDAH, SE.,MSA
19761210 200912 2 001

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | etheses.uin-malang.ac.id Internet Source | 3% |
| 2 | www.scribd.com Internet Source | 3% |
| 3 | es.scribd.com Internet Source | 2% |
| 4 | Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper | 2% |
| 5 | ppid.batukota.go.id Internet Source | 1% |
| 6 | eprints.umm.ac.id Internet Source | 1% |
| 7 | www.wikiapbn.org Internet Source | 1% |
| 8 | jdih.acehbaratdayakab.go.id Internet Source | 1% |
| 9 | Submitted to Universitas Sam Ratulangi | |

| | | |
|----|--|-----|
| | Student Paper | 1% |
| 10 | Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper | 1% |
| 11 | Submitted to iGroup Student Paper | 1% |
| 12 | jdih.acehtimurkab.go.id Internet Source | 1% |
| 13 | repository.unpas.ac.id Internet Source | <1% |
| 14 | www.bpk.go.id Internet Source | <1% |
| 15 | dokumen.tips Internet Source | <1% |
| 16 | eprints.undip.ac.id Internet Source | <1% |
| 17 | ejournal.unsrat.ac.id Internet Source | <1% |
| 18 | gunungsitolikota.go.id Internet Source | <1% |
| 19 | www.neliti.com Internet Source | <1% |

Submitted to Universitas Diponegoro